



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2023



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Siliwangi Nomor 355- 357 Semarang 50146 Telepon 7604640, 7605660, 7605700

Faksimile. 7607697 Laman : <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik : perhubungan@jatengprov.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	4
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.2.2 Peta Proses Bisnis.....	7
1.2.3 Struktur Organisasi	9
1.3 Isu – isu Strategis.....	11
1.3.1 Aspek Strategis Organisasi	11
1.3.2 Permasalahan Utama	12
1.3.3 Isu Strategis.....	13
1.4 Dukungan SDM, Sarana – Prasarana dan Anggaran	15
1.5 Sistematika Penulisan	19
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023	19
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	21
2.1.1 Visi, Misi dan Program Kerja	21
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan indikator	21
2.2 Strategi Dan Arah Kebijakan	23
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023	25
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	74
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	76
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	78
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	78
3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2023.....	78
3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023.....	79
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	80
3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan	83
3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	85
3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	88
3.2 Realisasi Anggaran	102
3.3 Inovasi.....	106
3.4 Penghargaan	107
BAB 4 PENUTUP	108
4.1 Kesimpulan	108
4.2 Rekomendasi	110
LAMPIRAN	111
Perjanjian Kinerja Tahun 2023	111
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Jumlah Pegawai (ASN) Menurut Lokasi Kerja	15
Tabel 1. 2 Daftar Inventarisasi Barang Tahun 2023	16
Tabel 1. 3 Dukungan Anggaran Tahun 2023	18
Tabel 1. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023.....	19
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	22
Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kesekretariatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.....	23
Tabel 2. 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kesekretariatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.....	23
Tabel 2. 4 Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	24
Tabel 2. 5 Tujuan / Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	25
Tabel 2. 6 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan TA 2023 Perubahan Pada Urusan Perhubungan	26
Tabel 2. 7 Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023 Perubahan	75
Tabel 2. 8 Dukungan Anggaran dari APBD Dinas Perhubungan TA 2023 Perubahan	76
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	78
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2023	78
Tabel 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023.....	80
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.....	81
Tabel 3. 5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.....	83
Tabel 3. 6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	85
Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Tahun 2023	89
Tabel 3. 8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pohon Kinerja Pencapaian Tujuan Dinas Perhubungan	2
Gambar 1. 2 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 1 Dinas Perhubungan.....	3
Gambar 1. 3 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 2 Dinas Perhubungan.....	3
Gambar 1. 4 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 3 Dinas Perhubungan.....	4
Gambar 1.5 Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	8
Gambar 1. 6 Peta Relasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.....	9
Gambar 1. 7 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	10
Gambar 1. 8 Bagan Struktur Organisasi BPSPP Wilayah Kelas A Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	10
Gambar 1. 9 Bagan Struktur Organisasi BPSPP Wilayah Kelas B Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	11
Gambar 1. 10 Bagan Struktur Organisasi Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	11
Gambar 1. 11 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat / Golongan (orang).....	16
Gambar 1. 12 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (orang)	16
Gambar 3. 1 Grafik Penggunaan Sumber Daya Keuangan.....	87
Gambar 3. 2 Peresmian BRT Trans Jateng Koridor Solo-Wonogiri Tahun 2023	94
Gambar 3. 3 Pembangunan Terminal Kutoarjo.....	94
Gambar 3. 4 Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan BPSPP Wilayah VI	97
Gambar 3. 5 Pemasangan Perlengkapan Jalan	97
Gambar 3. 6 Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan BPSPP Wilayah III	98
Gambar 3. 7 LPJU Terpasang di Dermaga Sungai.....	98
Gambar 3. 8 Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang (EWS).....	99
Gambar 3. 9 Tampilan Si-Anteng untuk menunjang indikator Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi	100
Gambar 3. 10 Aplikasi Si-Anteng	106
Gambar 3. 11 Penghargaan <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i> Nasional Presisi	107

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, LKjIP Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk komitmen nyata dinas dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja dinas telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, 24 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

HENGGAR BUDI ANGGORO, ST,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710914 199703 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai 2 (dua) tujuan dan 5 (lima) sasaran dengan capaian pada TA. 2023 yaitu :

Capaian tujuan 1 : memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah dengan Indikator persentase pelayanan transportasi antar kawasan pengembangan di provinsi jawa tengah capaian sebesar 106,64 % masuk katagori **sangat baik**. Tujuan 1 (satu) ini didukung oleh 3 (tiga) sasaran dengan tingkat ketercapaian kinerja:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Jaringan Distribusi Transportasi dengan indikator Persentase layanan jaringan distribusi transportasi capaiannya 122,38% dengan realisasi 73,89% dari target 60,38%. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran dengan total 13 (tiga belas) Indikator.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi capaiannya 96,81% dengan realisasi 49,81% dari target 51,45%. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan total 10 (sepuluh) Indikator.
3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi dengan indikator Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal capaiannya 100 % dengan realisasi 66.67 % dari target 66,67%. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan total 1 (satu) Indikator.

Capaian tujuan 2 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan Indikator persentase Nilai Kepuasan Masyarakat sebesar 100,16% atau realisasi nilai kepuasan masyarakat 80,13 lebih tinggi dari target 80. Dalam tujuan 2 (dua) ini didukung oleh 2 (dua) sasaran dengan tingkat ketercapaian kinerja :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Dari Survei Kepuasan Masyarakat dapat digambarkan rata – rata IKM

pada Tahun 2023 untuk masing – masing pelayanan public di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah nilai hasil IKM 80.75 dengan mutu pelayanan B atau baik kinerjanya. Nilai IKM ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang sebelumnya nilai hasil IKM 79.75 dengan mutu pelayanan B atau baik kinerjanya.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 82,05 meningkat dari tahun 2022 78,18, termasuk dalam kategori penilaian A (Memuaskan) dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa Dinas Perhubungan dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

BAB 1

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk komitmen nyata dinas dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 diharapkan dapat:

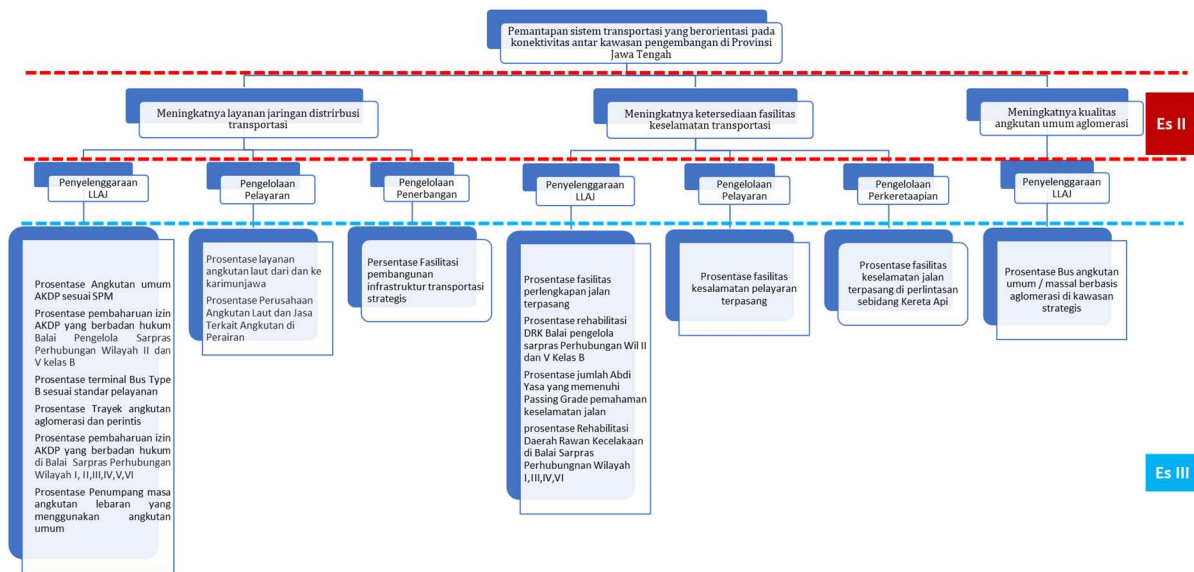
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.1 Latar Belakang

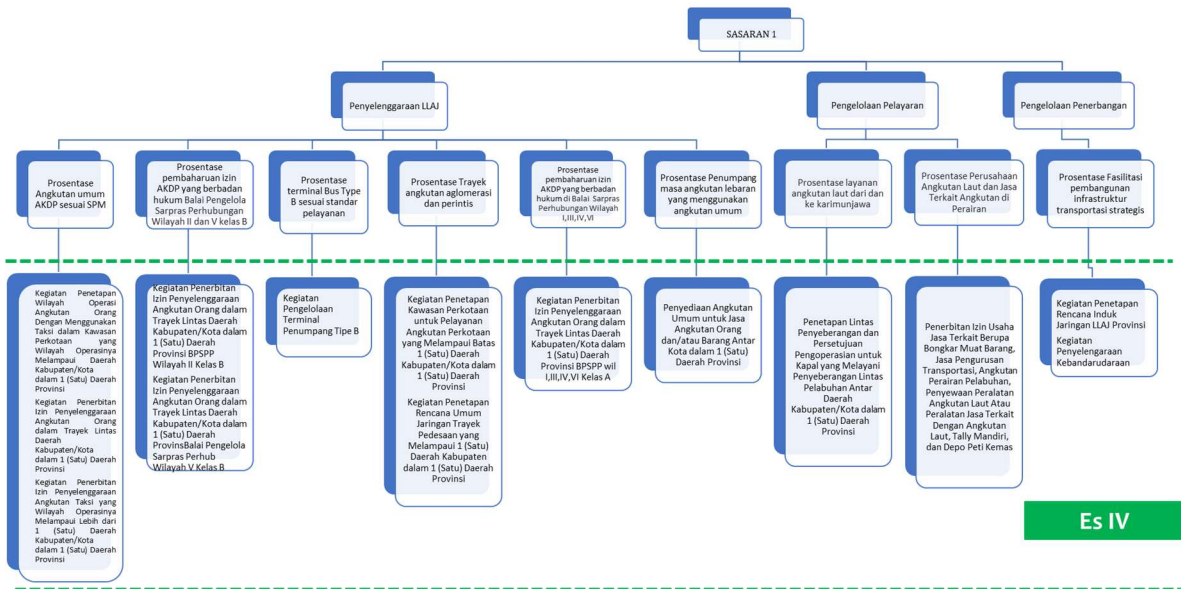
Berdasarkan peraturan gubernur nomor 108 tahun 2016 yang didalamnya tertuang pembentukan, organisasi dan tata kerja Pelaksana teknis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization), setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Visi Kepala Daerah "Jawa Tengah Berdikari dan Semakin

Sejahtera. (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” dimana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantapan system transportasi yang berorientasi pada konektifitas antar kawasan sehingga memudahkan mobilitas orang/barang dengan aman, selamat dan terjangkau sesuai kemampuan masyarakat membayar pelayanan transportasi. Selain itu terdapat program kerja Kepala Daerah yang difokuskan pada sektor transportasi yaitu pada program kerja Ke-7 “Pengembangan Transportasi Massal, Revitalisasi Jalur Kereta Dan Bandara Serta Pembangunan Embung/Irigasi”.

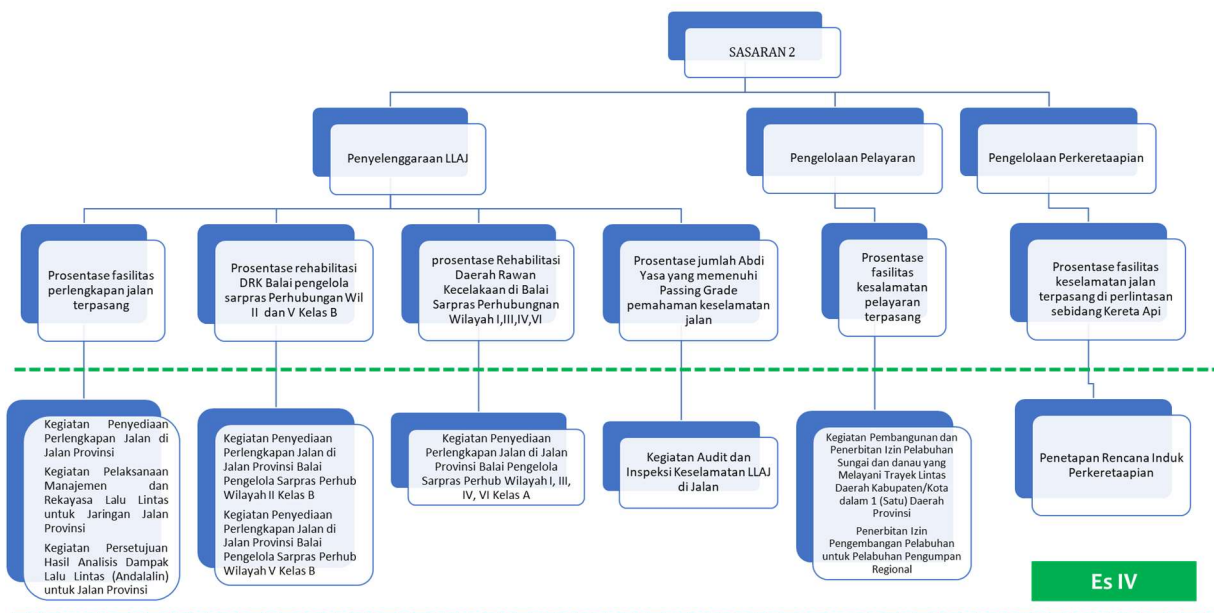
Pohon Kinerja yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan dalam mencapai Indikator Kinerja Utama, rencana kerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas. Pohon kinerja adalah sebagai berikut



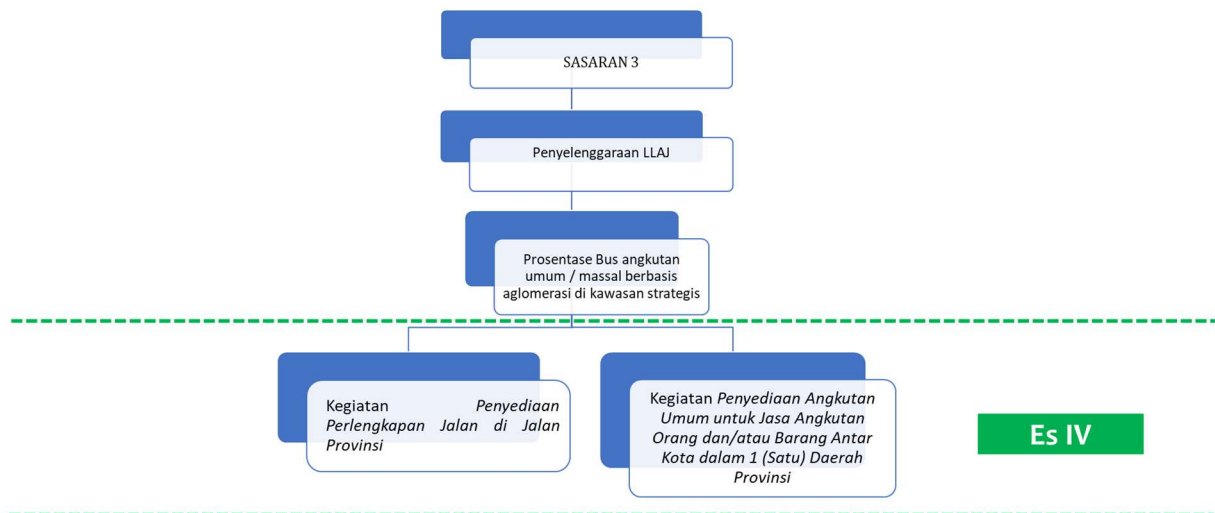
Gambar 1. 1 Pohon Kinerja Pencapaian Tujuan Dinas Perhubungan



Gambar 1. 2 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 1 Dinas Perhubungan



Gambar 1. 3 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 2 Dinas Perhubungan



Gambar 1. 4 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 3 Dinas Perhubungan

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas melaksanakan fungsi:

1. perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
2. pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
4. pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

Tugas dari anggota susunan organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas, dengan fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan
 - g. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
 - h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang manajemen Lalu Lintas Jalan, Rekayasa Lalu Lintas Jalan, dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
4. Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek, Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

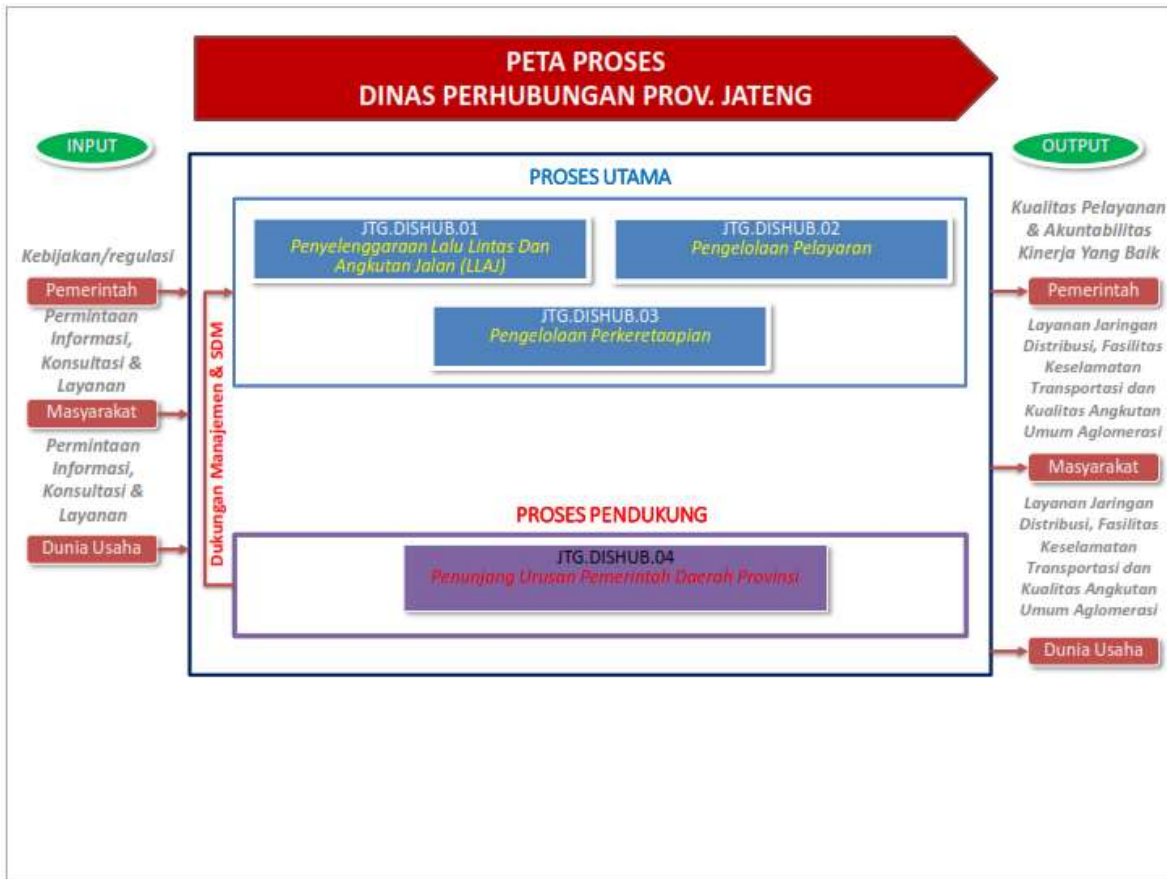
- kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan;
5. Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Terminal Angkutan Jalan, Perencanaan Transportasi, Dan Perkeretaapian.
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan transportasi;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkeretaapian.
6. Bidang Pelayaran mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut, Kepelabuhanan, Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepelabuhanan;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan.
7. Balai Perhubungan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang lalu lintas dan angkutan, sedangkan fungsinya adalah:
- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan
 - b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan
 - c. Evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan
 - d. Pengelolaan ketatausahaan dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

8. Balai Transportasi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah, sedangkan fungsinya adalah:
 - a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah
 - b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah
 - c. Evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah
 - d. Pengelolaan ketatausahaan dan Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

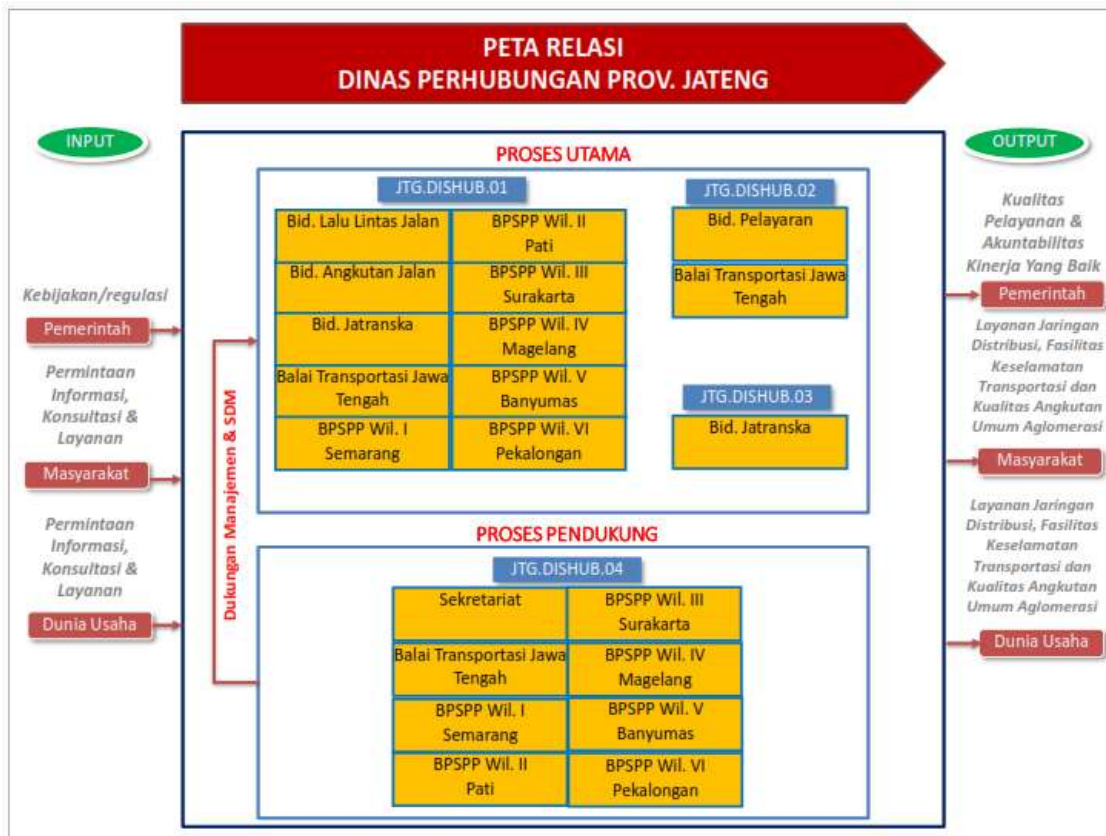
1.2.2 Peta Proses Bisnis

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memiliki acuan untuk menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien antar instansi dan / atau unit kerja di lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Tengah sesuai dengan visi misi dalam menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan yang digambarkan melalui peta proses bisnis dibawah ini :



Gambar 1.5 Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan peta proses bisnis tersebut maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dibagi kedalam beberapa unit kerja yang mendukung kinerja baik pada proses utama maupun proses pendukung Dinas. Adapun peta relasi dari proses bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah seperti pada gambar berikut :

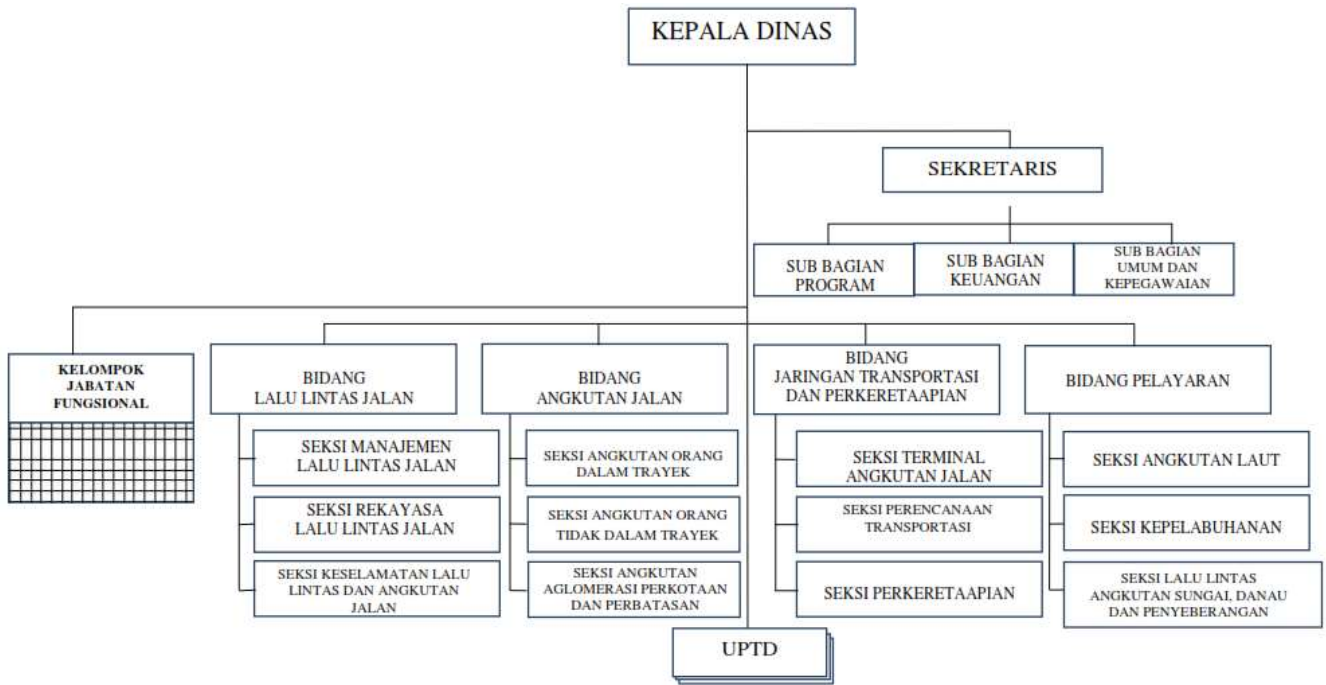


Gambar 1. 6 Peta Relasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

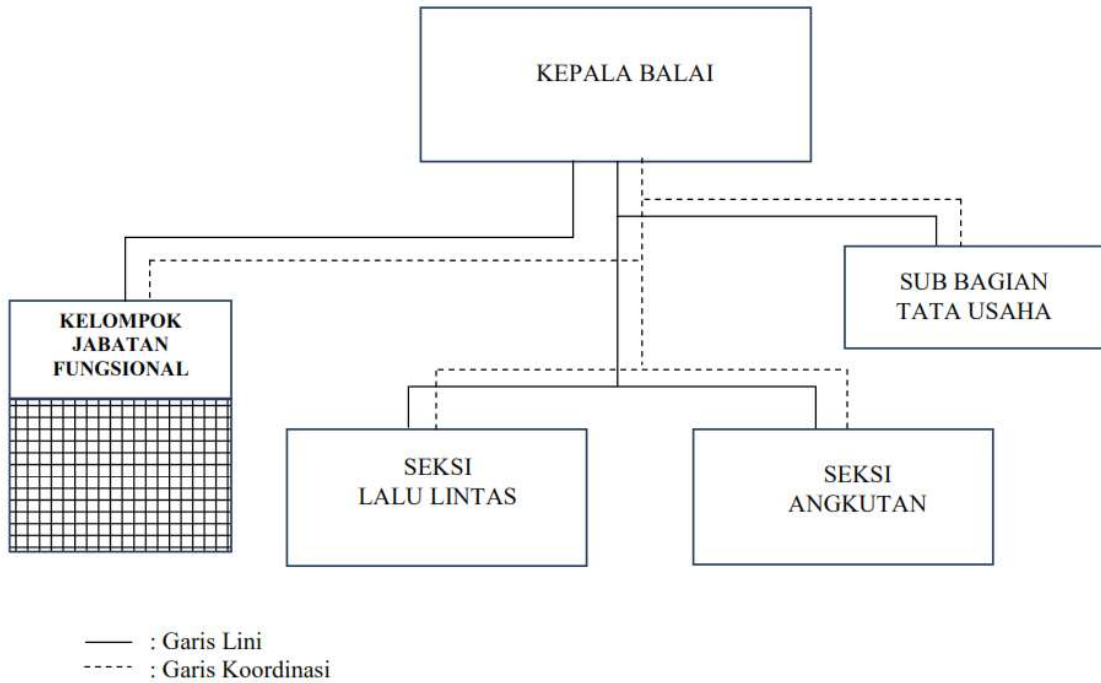
1.2.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, kedudukan Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

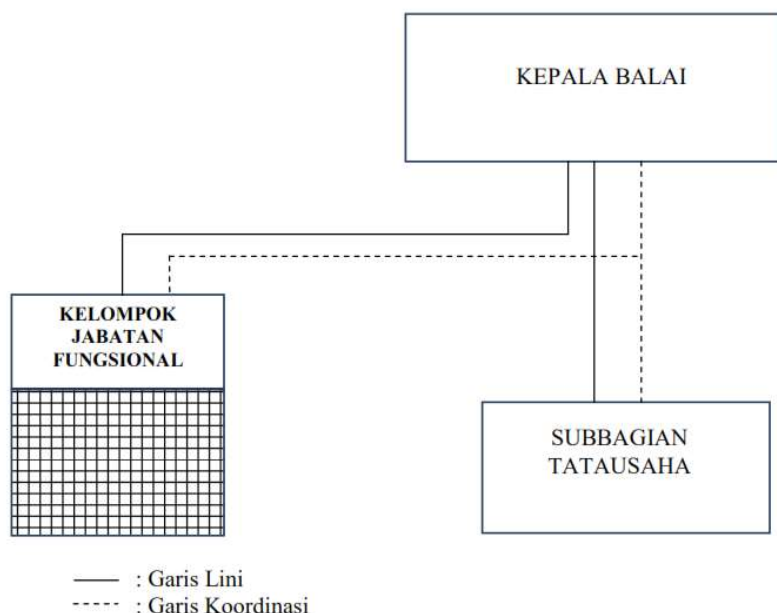
Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, Bidang Pelayaran, UPT Dinas sebanyak 6 Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah (4 BPSPP Kelas A dan 2 BPSPP Kelas B), dan Balai Transportasi Jawa Tengah serta kelompok jabatan fungsional sebagaimana gambar :



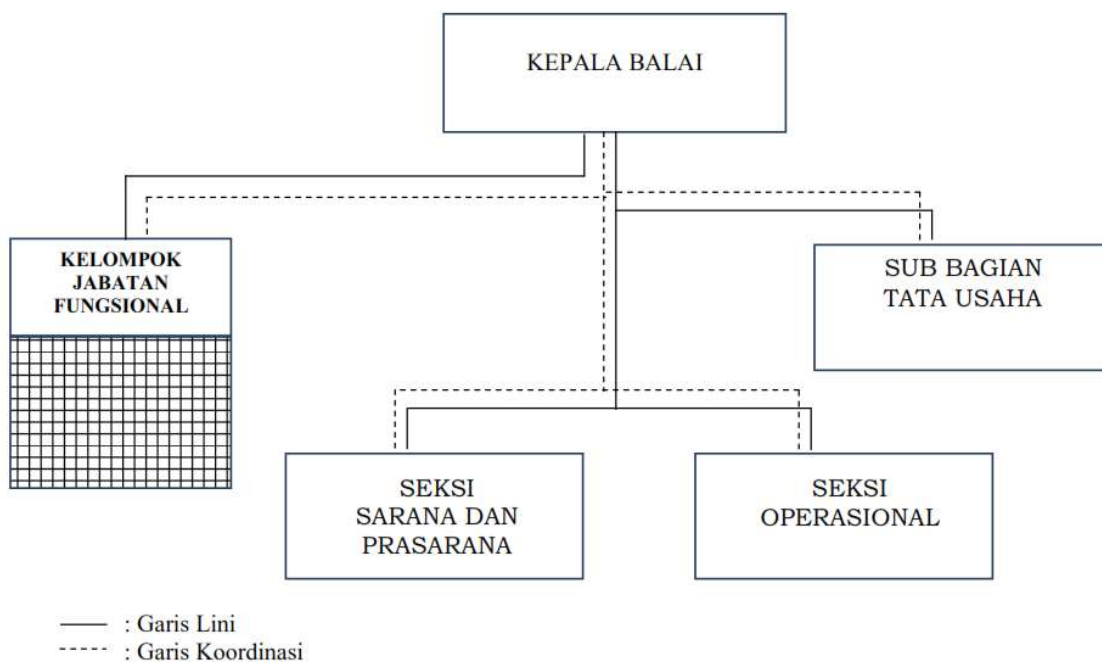
Gambar 1. 7 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 1. 8 Bagan Struktur Organisasi BPSPP Wilayah Kelas A Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 1. 9 Bagan Struktur Organisasi BPSPP Wilayah Kelas B Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 1. 10 Bagan Struktur Organisasi Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

1.3 Isu – isu Strategis

1.3.1 Aspek Strategis Organisasi

Visi Kepala Daerah “Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera. (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” dimana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung upaya tersebut melalui Tujuan Organisasi dengan memantapkan system transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar

kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah sehingga memudahkan mobilitas orang/barang dengan aman, selamat dan terjangkau serta pemenuhan Infrastruktur perhubungan strategis dalam menunjang pengembangan wilayah di Jawa Tengah, diantaranya terkait dengan Pengembangan wilayah di Jawa Tengah dikaitkan dengan adanya Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) serta Kawasan Industri Terpadu sesuai dengan Misi Gubernur Jawa Tengah Periode 2018 – 2023 serta program kerja Ke-7 “Pengembangan Transportasi Massal, Revitalisasi Jalur Kereta Dan Bandara Serta Pembangunan Embung/Irigasi”.

Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud untuk mendukung sasaran daerah ke-7 “Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan peran investasi terhadap ekonomi daerah” pada tujuan ke-4 “Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan” dari misi ke-3 yaitu “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”. Tujuan organisasi tersebut dijabarkan dalam Sasaran organisasi yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran tersebut adalah Meningkatkan layanan jaringan distribusi transportasi, Meningkatkan ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi dan Meningkatkan kualitas angkutan umum aglomerasi.

1.3.2 Permasalahan Utama

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, terkait review faktor pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari gambaran pelayanan OPD; sasaran jangka menengah Renstra K/L, OPD Provinsi/Kabupaten/Kota; implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; implikasi KLHS bagi pelayanan OPD. Isu-isu Strategis sebagai berikut

1. Konektivitas

- a. Belum optimalnya pelayanan inter/antarmoda transportasi yang menghubungkan bandara, pelabuhan, terminal dan stasiun;
- b. Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat kegiatan strategis

2. Simpul

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan terminal angkutan penumpang tipe B dan terminal angkutan barang
 - b. Belum optimalnya keselamatan dan pelayanan perhubungan udara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Jawa Tengah
 - c. Belum optimalnya pelayanan pelabuhan pengumpan regional dan pelayanan dermaga penyeberangan dalam mendukung distribusi angkutan orang dan barang di Jawa Tengah
3. Ruang Pergerakan
- a. Tingginya volume kendaraan (LHR) di jalan raya yang mengakibatkan kemacetan
 - b. Belum seimbangnya pertumbuhan antara jaringan kereta api dengan permintaan perjalanan dengan menggunakan moda kereta api
4. Keselamatan
- a. Tingginya angka kecelakaan di jalan raya dan perlintasan KA
 - b. Belum optimalnya penanganan prasarana dalam mendukung keselamatan pelayaran dan Udara

1.3.3 Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 yang juga berkaitan dengan pelayanan OPD Dinas Perhubungan yaitu:

1. Penanggulangan kemiskinan

Pada bulan September 2021, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan yaitu dari 11,79 persen pada bulan Maret RKPD Tahun 2023 Bab II - 223 2021 menjadi 11,25 persen pada bulan September 2021. Secara absolut jumlahnya berkurang sebanyak 175,74 ribu orang yaitu dari 4,11 juta orang menjadi 3,93 juta orang. Persoalan kemiskinan di Jawa Tengah masih bermuara pada hal mendasar antara lain menyangkut akses terhadap kebutuhan dasar, kehidupan ekonomi yang berkelanjutan, perilaku dan budaya masyarakat, serta tata kelola penanggulangan kemiskinan antara lain terutama terkait data dan ketepatan sasaran intervensi. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan Dinas

Perhubungan melalui BRT Trans Jateng memberikan subsidi tarif angkutan umum, sehingga mampu menurunkan biaya mobilitas masyarakat.

2. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2021 mulai menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2020. Secara kumulatif, ekonomi Jawa Tengah tahun 2021 tumbuh positif sebesar 3,32 persen (c to c). Tiga sektor unggulan Jawa Tengah seluruhnya tumbuh positif meliputi sektor perdagangan, industri pengolahan, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kondisi ekonomi yang semakin membaik juga berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Pada periode Agustus 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah sebesar 5,95 persen atau sebanyak 1,13 juta orang, turun 0,53 persen dibandingkan periode Agustus 2020. Dampak pandemi Covid-19 terhadap ketenagakerjaan juga mulai menurun. Dari empat komponen kelompok tenaga kerja yang terdampak Covid-19 seluruhnya mengalami penurunan, baik penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja, penduduk yang sementara tidak bekerja, bukan angkatan kerja, serta penduduk yang pernah berhenti bekerja karena Covid-19. Dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah Dinas Perhubungan membuka lapangan pekerjaan melalui recruitment karyawan BRT Trans Jateng yang tersebar di 7 koridor mencakup 4 wilayah aglomerasi.

3. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam

Isu global yang berpengaruh pada keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Jawa Tengah adalah pengurangan emisi Gas Rumah Kaca dengan penerapan BRT Trans Jateng sehingga terjadi moda shifting dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

4. Kesenjangan wilayah

Isu penting terkait kesenjangan wilayah adalah akses antar daerah dalam rangka peningkatan konektivitas dan kemudahan distribusi barang dan jasa antar daerah dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah. Selain itu persebaran pusat-pusat pertumbuhan yang belum merata juga menjadi persoalan penting yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah di Jawa Tengah, terutama di perkotaan dan perdesaan.

Untuk mendukung hal tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memberikan kontribusi dalam peningkatan aksesibilitas dan mobilitas utamanya untuk menunjang kegiatan perekonomian (pariwisata dan industri) yaitu

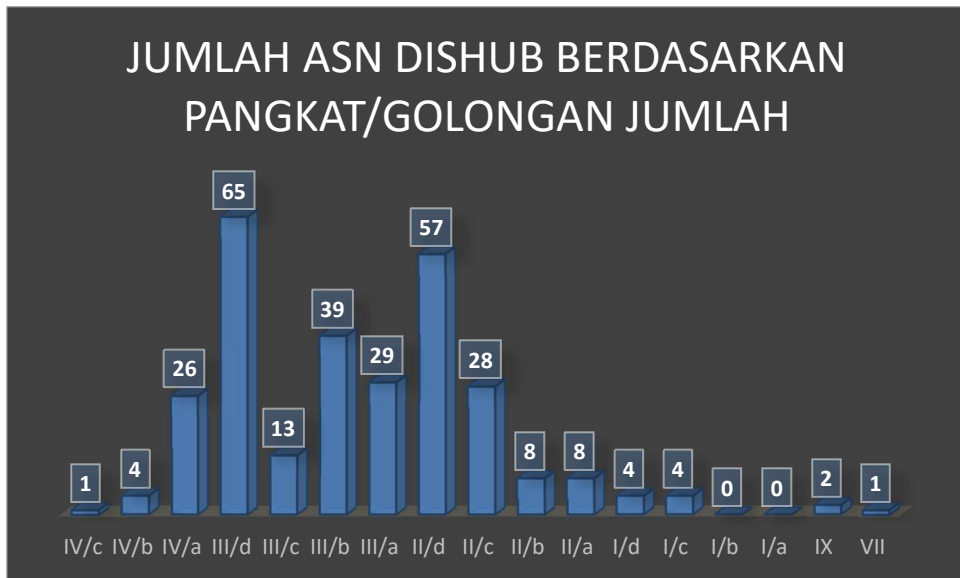
penyediaan angkutan umum massal di 7 (tujuh) koridor BRT Trans Jateng. Selain itu Dinas Perhubungan juga memasang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di sejumlah wilayah di Jawa Tengah dalam rangka mempermudah akses antar daerah serta peningkatan konektivitas sehingga ketimpangan antar wilayah di Jawa Tengah mampu di atasi.

1.4 Dukungan SDM, Sarana – Prasarana dan Anggaran

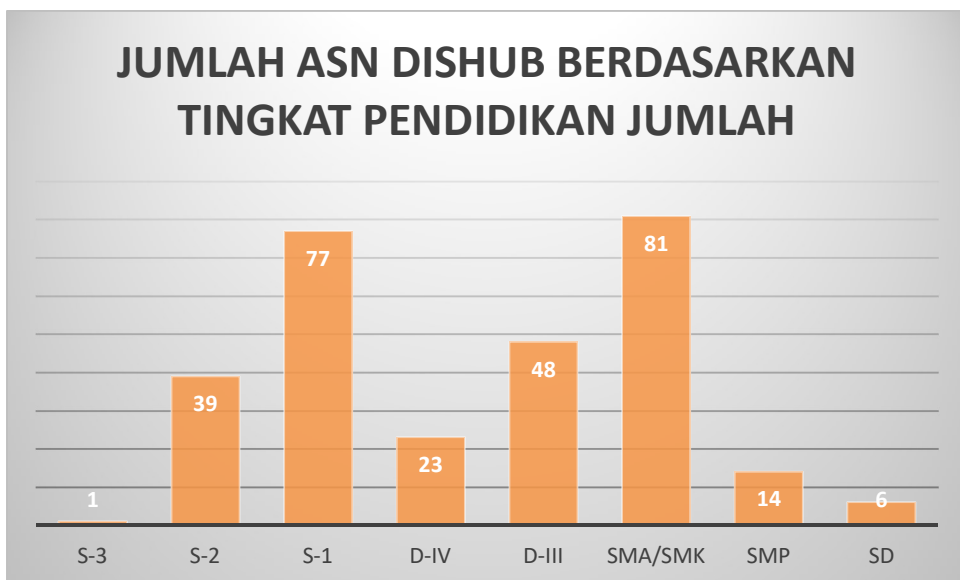
Sumber Daya Manusia di Dinas Perhubungan terdiri dari ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Tenaga Teknis (Pegawai Tidak Tetap) yang total berjumlah 551 terdiri dari 289 ASN (52%) dan 262 PTT (48%). Data Pegawai (ASN) sebagaimana tabel :

Tabel 1. 1 Daftar Jumlah Pegawai (ASN) Menurut Lokasi Kerja

NO	UNIT ORGANISASI	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	45
3	Bidang Lalu Lintas Jalan	12
4	Bidang Angkutan Jalan	11
5	Bidang Jaringan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	11
6	Bidang Pelayaran	9
7	BPSPP Wilayah I	27
8	BPSPP Wilayah II	18
9	BPSPP Wilayah III	68
10	BPSPP Wilayah IV	20
11	BPSPP Wilayah V	21
12	BPSPP Wilayah VI	25
13	Balai Transportasi Jawa Tengah	21
	Jumlah	289



Gambar 1. 11 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat / Golongan (orang)



Gambar 1. 12 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (orang)

Dari data tersebut diketahui bahwa menurut Pangkat/Golongan, ASN yang paling banyak yaitu berpangkat/golongan III/d dengan jumlah 65 (22%) orang dan menurut tingkat pendidikan, ASN yang paling banyak berpendidikan SMU/SMA/SMK dengan 81 Orang (28%) dan berpendidikan Sarjana dengan 77 orang (27%).

Untuk Sumber Daya Aset Dinas Perhubungan sebagaimana table :

Tabel 1. 2 Daftar Inventarisasi Barang Tahun 2023

No.	Kode Barang	Uraian	SALDO AKHIR Periode 2023	
			Jml.	Harga

No.	Kode Barang	Uraian	SALDO AKHIR Periode 2023	
			Jml.	Harga
1	2	3	4	5
1	1.3.1.01	TANAH	96	193.819.625.633,00
2	1.3.2.01	ALAT BESAR	14	1.980.734.500,00
3	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	141	28.764.134.421,00
4	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	182	5.169.070.700,00
5	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	-	-
6	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.186	9.155.059.402,00
7	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	295	2.494.427.176,00
8	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	6	8.150.000,00
9	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	4	163.343.000,00
10	1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	18	31.204.725,00
11	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	586	6.147.384.879,00
12	1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-
13	1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-
14	1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-
15	1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-
16	1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-
17	1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-
18	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-
19	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	987	29.347.504.011,00
20	1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	6	8.601.440,00
21	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	746	133.280.888.456,00
22	1.3.3.02	MONUMEN	-	-
23	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	1	386.581.815,00
24	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	6	974.927.508,00
25	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	38	41.000.843.913,00
26	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	20	6.177.909.931,00
27	1.3.4.03	INSTALASI	445	12.853.963.991,00
28	1.3.4.04	JARINGAN	1.044	20.703.045.136,00
29	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	136	26.090.000,00
30	1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	22	387.710.000,00
31	1.3.5.03	HEWAN	-	-
32	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-	-
33	1.3.5.05	TANAMAN	42	39.465.000,00
34	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-

No.	Kode Barang	Uraian	SALDO AKHIR Periode 2023	
			Jml.	Harga
35	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-
36	1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	19	2.938.774.288,00
			7.040	495.859.439.925,00

Sumber : Dinas Perhubungan

Kebutuhan ruangan kantor umum sudah tersedia meliputi ruang kerja, ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah cukup memadai.

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Dukungan Anggaran Tahun 2023

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	27.900.000.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27.900.000.000
4.1.2	Retribusi Daerah	5.400.000.000
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	22.500.000.000
5	BELANJA DAERAH	200.605.355.000
5.1	BELANJA OPERASI	179.057.963.000
5.1.1	Belanja Pegawai	42.913.593.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	136.144.370.000
5.2	BELANJA MODAL	21.547.392.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.229.741.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.117.651.000
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000
	Surplus/(Defisit)	(172.705.355.000)

Dukungan Anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar Rp. 200.605.355.000,- terdiri dari Rp. 179.057.963.000,- Belanja Operasi berupa Gaji Pegawai Rp. 42.913.593.000,- dan belanja Barang Jasa Rp. 136.144.370.000 serta Belanja Modal sebesar Rp. 21.547.392.000,-.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) TA 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi, dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023

Rangkuman Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. 4 Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Nilai hasil evaluasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah adalah 82,05 termasuk dalam kategori penilaian "A" (Memuaskan) dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa Dinas Perhubungan dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon4/Pengawas/Subkoordinator;	a. Menyelaraskan indikator dan target kinerja sasaran dokumen Perencanaan Kinerja yaitu: 1. Tahun 2022 keselarasan antara RKT, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, DPA dan LkjIP. Apabila terjadi perubahan indikator dan target agar dilakukan perubahan pada RKT, Renja, PK sehingga ada keselarasan dan kesinambungan dalam dokumen Perencanaan Kinerja; 2. Tahun 2023 keselarasan antara Renstra, RKT, Renja, PK, DPA dan LkjIP. Apabila terjadi perubahan indikator dan target agar dilakukan perubahan pada	- Telah dilakukan penyelarasan indikator dan target antara RKT, Renja, dan PK pada perubahan anggaran tahun 2022 dan 2023, bukti dukung sudah kami upload pada alamat yang tertulis pada surat diatas.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
		RKT, Renja, PK sehingga ada keselarasan dan kesinambungan dalam dokumen Perencanaan Kinerja.	
		b. Untuk pemahaman, kepedulian, serta komitmen dalam mencapai kinerja, Pakta Integritas agar dilaksanakan sampai dengan seluruh pegawai di lingkungannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 1;	- Telah dilakukan penyusunan pakta integritas sampai dengan level staf pada Tahun Anggaran 2024, bukti dukung sudah kami upload pada alamat yang tertulis pada surat diatas.
		c. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja yang telah disusun agar dilengkapi dengan simbol-simbol yang akhirnya akan mengarah pada terbentuknya diagram alur yang menggambarkan aliran aktivitas atau kegiatan masing-masing unit organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;	- Telah melengkapi SOP pengumpulan data kinerja yang telah disusun dengan simbol-simbol yang mengarah pada terbentuknya diagram alur yang menggambarkan aliran aktivitas atau kegiatan masing-masing unit organisasi, bukti dukung sudah kami upload pada alamat yang tertulis pada surat diatas
		d. Dalam setiap Notulen Rakor POK agar diberikan catatan solusi/rekomendasi atas permasalahan/kendala yang dihadapi;	- Telah memberikan catatan solusi/rekomendasi atas permasalahan/kendala yang dihadapi pada Notulen Rakor POK bulan Oktober & November tahun 2023. Sedangkan pada bulan desember sudah tidak ada permasalahan karena capaian progres sudah mencapai 100%, bukti dukung sudah kami upload pada alamat yang tertulis pada surat diatas.
		e. Pada penyusunan Dokumen LKjIP Tahun 2023 analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja agar diperjelas efisiensinya.	- Penyusunan LKjIP Tahun 2023 telah diberikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dalam bentuk grafik beserta penjelasannya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

2.1.1 Visi, Misi dan Program Kerja

Visi Kepala Daerah "Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera. (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi" dimana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantapan system transportasi yang berorientasi pada konektifitas antar kawasan sehingga memudahkan mobilitas orang/barang dengan aman, selamat dan terjangkau sesuai kemampuan masyarakat membayar pelayanan transportasi.

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub rukun untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan gubernur No. 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terdapat program kerja Kepala Daerah yang difokuskan pada sektor transportasi yaitu pada program kerja Ke-7 "Pengembangan Transportasi Massal, Revitalisasi Jalur Kereta Dan Bandara Serta

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan indikator

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Adapun tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah "Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah", dengan indikator tujuan persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah, diharapkan pada akhir tahun 2023 mencapai 59,50%. Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

sebagaimana dimaksud untuk mendukung sasaran daerah ke-7 “Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan peran investasi terhadap ekonomi daerah” pada tujuan ke-4 “Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan” dari misi ke-3 yaitu “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”.

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Untuk mendukung pencapaian tujuan dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi, dengan indikator persentase layanan jaringan distribusi transportasi pada tahun 2023 sebesar 60,38%
2. Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi dengan indikator persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi pada tahun 2023 sebesar 51,45%
3. Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi dengan indikator persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal pada tahun 2023 sebesar 66,67%

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah		Prosentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah	25,59	34,45	42,37	49,87	59,5	59,5
		Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	prosentase layanan jaringan distribusi transportasi	34,75	42,12	49,08	54,46	60,38	60,38
		Meningkatnya ketersediaan fasilitas	prosentase pemenuhan fasilitas	8,69	21,22	31,36	41,82	51,45	51,45

		keselamatan transportasi	keselamatan transportasi						
		Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi	prosentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	33,33	40	46,67	53,33	66,67	66,67

Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kesekretariatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah		Nilai Reformasi Birokrasi	65,13	67,73	70,33	-	-	-
		Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	60	65	70	75	80	80
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Sakip Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	70,25	70,45	70,65	70,85	71,00	71,00

Tabel 2. 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kesekretariatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah		Nilai Kepuasan Masyarakat	-	-	-	72,93	75,50	75,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	60	65	70	75	80	80
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Sakip Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	70,25	70,45	70,65	70,85	71,00	71,00

2.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Misi dan Program Kerja Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Misi dan program kerja tersebut maka dirumuskan strategi 5 (lima) tahun mendatang. Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa. Adapun strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel :

Tabel 2. 4 Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan
1	Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah	Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan secara menyebar dan meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan.dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah	Tahun I s.d Tahun V : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung wilayah pengembangan kawasan strategis, KSPN dan KSP di Jawa Tengah. 2. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan daerah dalam Fasilitas Revitalisasi Kereta Api, Pengembangan Pelabuhan dan pengembangan Bandar Udara 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang perhubungan 4. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) sarana dan prasarana serta pelayanan di Bidang Perhubungan
		Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan secara menyebar dan meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan.dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah	Tahun I s.d Tahun V : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fasilitas keselamatan transportasi di jalan, perlintasan KA, Pelabuhan dan Dermaga 2. Peningkatan edukasi kepadaPemerintah Daerah dan masyarakat terkaitpenyelenggaraan urusan perhubungan dan keselamatan transportasi 3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan jalan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan
		Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi	Mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) berbasis Sustainable Transport yang terintegrasi intermoda dengan aglomerasi pengembangan Kawasan Strategis Wilayah secara menyebar dan merata	Tahun I s.d Tahun V : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan angkutan umum yang inklusif dan memadai disertai dengan evaluasi kemampuan penyelenggara, dan pengembangan jumlah koridor angkutan aglomerasi. 2. Peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat dengan menerapkan system Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Perencanaan kinerja menjabarkan dari tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam target perubahan renstra :

Tabel 2. 5 Tujuan / Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

NO	Tujuan/Sasaran/Program / Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2023
1	Memantapkan Sistem Transportasi Yang Berorientasi Pada Konektivitas Antar Kawasan Pengembangan Di Provinsi Jawa Tengah		Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	%	59,5
		Meningkatnya Layanan Jaringan Distribusi Transportasi	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	60,38
		Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	51,45
		Meningkatnya Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	66,67
2	Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah		Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	80
		Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	80
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Sakip Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Angka	71

Secara lengkap tabel program dan kegiatan urusan perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan TA 2023 Perubahan Pada Urusan Perhubungan

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
1	2	3	4	5
Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah			139.756.314.000	Dinas Perhubungan
	Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah	59,5		
Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi			139.756.314.000	Dinas Perhubungan
	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	51,45	22.763.345.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			18.115.405.000	
	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	52,34	8.032.375.000	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			6.996.264.000	
	Jumlah total perlengkapan jalan terpasang di Ruas Jalan Provinsi	4252	6.996.264.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN
<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>			6.996.264.000	
	<i>Jumlah Pengadaan Aplikator Marka</i>			SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan APILL</i>	2	515.000.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan ITS</i>			SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan LPJU</i>	286	5.552.939.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Rambu</i>	350	382.000.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan RPPJ</i>	29	273.825.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Warning Light</i>	10	272.500.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			911.111.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng	18	46.320.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN
<i>Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>			46.320.000	
	<i>Jumlah Peserta Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng Lomba Tertib Lalin Tingkat Nasional</i>	18	46.320.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN
	<i>Jumlah pelaksanaan Supervisi MRLL untuk Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan</i>	42	60.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
<i>Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi</i>			60.000.000	
	<i>Jumlah Supervisi Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan</i>	21	60.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ</i>	26	804.791.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
<i>Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>			804.791.000	
	<i>Jumlah Pelaksanaan Forum LLAJ</i>	6	804.791.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi			125.000.000	
	Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalalin di Jalan Provinsi	119	125.000.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN
<i>Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin</i>			125.000.000	
	<i>Jumlah penilaian dan pengawasan Andalalin di Ruas Jalan Provinsi</i>	24	125.000.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN
	Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	18,52	235.000.000	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			235.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	Jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	362	200.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi</i>			200.000.000	
	<i>Jumlah peserta Abdi Yasa yang mengikuti pemahaman keselamatan jalan</i>	70	130.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
	<i>Jumlah peserta Pelajar Pelopor yang mengikuti pemahaman keselamatan jalan</i>	35	70.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
	<i>Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Perusahaan Angkutan Umum</i>	12	35.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>			35.000.000	
	<i>Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Penumpang dan Barang diperiksa (Bidang Lalu Lintas)</i>	0	-	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
	<i>Jumlah Pengawasan Perusahaan Karoseri Terdaftar</i>	20	35.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	62,5	1.760.780.000	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			1.760.780.000	
	Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah III Kelas A	10	328.000.000	SEKSI LALU LINTAS
<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>			328.000.000	
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	0	-	SEKSI LALU LINTAS
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	0	-	SEKSI LALU LINTAS

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	0	-	SEKSI LALU LINTAS
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	10000	328.000.000	SEKSI LALU LINTAS
	<i>Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	0	-	SEKSI LALU LINTAS
	<i>Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah III Kelas A</i>	11,45	1.432.780.000	SEKSI LALU LINTAS
<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>			1.432.780.000	
	<i>Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	76	1.095.780.000	SEKSI LALU LINTAS
	<i>Jumlah Penggantian LPJU (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	60	337.000.000	SEKSI LALU LINTAS
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			-	
	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah III Kelas A	0	-	SEKSI LALU LINTAS
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>			-	
	<i>Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	0	-	SEKSI LALU LINTAS
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	50	1.879.680.000	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			1.879.680.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah II Kelas B	11	473.000.000	KEPALA BALAI
<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>			473.000.000	
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	3	28.000.000	KEPALA BALAI
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	0	-	KEPALA BALAI
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	0	-	KEPALA BALAI
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	15000	445.000.000	KEPALA BALAI
	<i>Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	0	-	KEPALA BALAI
	<i>Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah II Kelas B</i>	10,05	1.406.680.000	KEPALA BALAI
<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>			1.406.680.000	
	<i>Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	52	1.104.180.000	KEPALA BALAI
	<i>Jumlah Penggantian LPJU (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	55	302.500.000	KEPALA BALAI
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			-	
	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah II Kelas B	0	-	KEPALA BALAI
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>			-	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	<i>Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	0	-	KEPALA BALAI
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	31,25	1.269.330.000	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			1.269.330.000	
	Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah I Kelas A	10	410.000.000	SEKSI LALU LINTAS
<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>			410.000.000	
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	0	-	SEKSI LALU LINTAS
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	0	-	SEKSI LALU LINTAS
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	30	170.000.000	SEKSI LALU LINTAS
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	10000	240.000.000	SEKSI LALU LINTAS
	<i>Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	0	-	SEKSI LALU LINTAS
	<i>Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah I Kelas A</i>	10,25	859.330.000	SEKSI LALU LINTAS
<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>			859.330.000	
	<i>Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	50	584.330.000	SEKSI LALU LINTAS
	<i>Jumlah Penggantian LPJU (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	50	275.000.000	SEKSI LALU LINTAS

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			-	
	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah I Kelas A	0	-	SEKSI LALU LINTAS
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>			-	
	<i>Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	0	-	SEKSI LALU LINTAS
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	38,46	1.783.330.000	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			1.783.330.000	
	Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	10	540.000.000	SEKSI LALU LINTAS
<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>			540.000.000	
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	0	-	SEKSI LALU LINTAS
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	0	-	SEKSI LALU LINTAS
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	25	300.000.000	SEKSI LALU LINTAS
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	10000	240.000.000	SEKSI LALU LINTAS
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	0	-	SEKSI LALU LINTAS
	<i>Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	0	-	SEKSI LALU LINTAS

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	<i>Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah IV Kelas A</i>	10,75	1.243.330.000	SEKSI LALU LINTAS
<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>			1.243.330.000	
	<i>Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	62	696.330.000	SEKSI LALU LINTAS
	<i>Jumlah Penggantian LPJU (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	80	547.000.000	SEKSI LALU LINTAS
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			-	
	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	0	-	SEKSI LALU LINTAS
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>			-	
	<i>Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	0	-	SEKSI LALU LINTAS
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	34,48	1.881.680.000	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			1.881.680.000	
	Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	11	418.000.000	SEKSI LALU LINTAS
<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>			418.000.000	
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	5	28.000.000	SEKSI LALU LINTAS

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	0	-	SEKSI LALU LINTAS
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	0	-	SEKSI LALU LINTAS
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	10000	390.000.000	SEKSI LALU LINTAS
	<i>Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	0	-	SEKSI LALU LINTAS
	<i>Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah VI Kelas A</i>	10,25	1.463.680.000	SEKSI LALU LINTAS
<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>			1.463.680.000	
	<i>Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	44	1.161.180.000	SEKSI LALU LINTAS
	<i>Jumlah Penggantian LPJU (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	55	302.500.000	SEKSI LALU LINTAS
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			-	
	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	0	-	SEKSI LALU LINTAS
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>			-	
	<i>Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	0	-	SEKSI LALU LINTAS
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	76,92	1.273.230.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			1.273.230.000	
	Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah V Kelas B	10	370.000.000	KEPALA BALAI
<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>			370.000.000	
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	0	-	KEPALA BALAI
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	0	-	KEPALA BALAI
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Gazon (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	0	-	KEPALA BALAI
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	0	-	KEPALA BALAI
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	10000	370.000.000	KEPALA BALAI
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	0	-	KEPALA BALAI
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Water Barrier (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	0	-	KEPALA BALAI
	<i>Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	0	-	KEPALA BALAI
	<i>Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah V Kelas B</i>	9,75	903.230.000	KEPALA BALAI
<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>			903.230.000	
	<i>Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	52	628.230.000	KEPALA BALAI
	<i>Jumlah Penggantian LPJU (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	50	275.000.000	KEPALA BALAI

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			-	
	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah V Kelas B	0	-	KEPALA BALAI
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>			-	
	<i>Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	0	-	KEPALA BALAI
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			1.393.000.000	
	Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang	75	1.393.000.000	
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			155.000.000	
	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang beroperasi	3	155.000.000	SEKSI KEPELABUHANAN
<i>Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional</i>			155.000.000	
	<i>Jumlah Evaluasi & monitoring faspel, kinerja pelabuhan</i>	13	115.265.000	SEKSI KEPELABUHANAN
	<i>Jumlah Pemasangan & pelepasan mooring buoy</i>	0		SEKSI KEPELABUHANAN
	<i>Jumlah Pemeliharaan SBNP</i>	0		SEKSI KEPELABUHANAN
	<i>Jumlah Penyusunan buku fasilitas pelabuhan di Jateng</i>	10	8.585.000	SEKSI KEPELABUHANAN
	<i>Jumlah Rakor pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan</i>	3	20.250.000	SEKSI KEPELABUHANAN
	<i>Jumlah Sosialisasi keselamatan pelayaran & pengadaan alat keselamatan pelayaran</i>	0		SEKSI KEPELABUHANAN
	<i>Jumlah Sosialisasi SOP perijinan kepelabuhanan</i>	2	10.900.000	SEKSI KEPELABUHANAN

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1.238.000.000	
	Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan	6	1.238.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
<i>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>			30.000.000	
	<i>Jumlah SK Gubernur terkait Penetapan trayek penyeberangan sungai lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	1	30.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
<i>Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>			1.161.000.000	
	<i>Jumlah Pembangunan Plengsengan Sungai</i>	3	1.086.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
	<i>Jumlah PJU Terpasang di dermaga sungai</i>	3	75.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
<i>Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>			47.000.000	
	<i>Jumlah alat keselamatan ASDP</i>	0		SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
	<i>Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja ASDP</i>	12	47.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
	<i>Jumlah peserta Sosialisasi Keselamatan ASDP</i>	0	-	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			3.254.940.000	
	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	45,45	3.254.940.000	
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			3.254.940.000	
	Jumlah Peraturan Gubernur Terkait Penetapan Rencana Induk Jaringan Perkeretaapian Provinsi Jawa Tengah	0	-	SEKSI PERKERETAAPIAN
<i>Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian</i>			-	
	<i>Jumlah Penyusunan, Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian</i>	0	-	SEKSI PERKERETAAPIAN
	<i>Jumlah perlintasan KA yang dilengkapi prasarana penunjang sesuai tingkat pemenuhan per jenis Fasilitas keselamatan</i>	10	3.254.940.000	SEKSI PERKERETAAPIAN
<i>Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian</i>			3.254.940.000	
	<i>Jumlah FGD Revitalisasi Jalur KA</i>	0		SEKSI PERKERETAAPIAN
	<i>Jumlah Pengadaan dan pemasangan Early Warning System</i>	7	2.135.916.000	SEKSI PERKERETAAPIAN
	<i>Jumlah Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang</i>	3	242.000.000	SEKSI PERKERETAAPIAN
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan PJU di Perlintasan sebidang</i>	0	-	SEKSI PERKERETAAPIAN
	<i>Jumlah Pengadaan Gazon di perlintasan Sebidang</i>	0	-	SEKSI PERKERETAAPIAN
	<i>Jumlah Pengaman penunjang keselamatan di perlintasan sebidang</i>	4	877.024.000	SEKSI PERKERETAAPIAN
	<i>Jumlah Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang</i>	0	-	SEKSI PERKERETAAPIAN
Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi			139.756.314.000	Dinas Perhubungan

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	66,67	105.942.854.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			105.942.854.000	
	Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	34,85	105.942.854.000	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			1.833.020.000	
	Jumlah shelter dalam kondisi baik yang siap operasional	214	1.833.020.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA
<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</i>			1.833.020.000	
	<i>Jumlah Pemeliharaan dan Pembangunan Shelter BRT Trans Jateng</i>	3	1.833.020.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			104.109.834.000	
	Jumlah bus Trans Jateng yang beroperasi di Kawasan Aglomerasi Perkotaan	107	104.109.834.000	SEKSI OPERASIONAL
<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>			104.109.834.000	
	<i>Jumlah koridor angkutan umum massal di Kawasan Aglomerasi Perkotaan</i>	7	104.109.834.000	SEKSI OPERASIONAL
Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi			139.756.314.000	Dinas Perhubungan
	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	60,38	11.050.115.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			9.856.999.000	
	Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	5,68	50.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			50.000.000	
	Jumlah penerbitan dokumen perizinan trayek AKDP Sesuai SPM	366	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
<i>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>			50.000.000	
	<i>Jumlah Evaluasi Trayek AKDP</i>	0		SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
	<i>Jumlah Perusahaan AKDP yang memenuhi Standar Pelayanan Angkutan Orang</i>	30	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-	
	Jumlah perusahaan yang dievaluasi tarif dan load factor	0	-	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
<i>Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi</i>			-	
	<i>Jumlah evaluasi tarif dan load factor Trayek angkutan AKDP kelas Ekonomi</i>	0	-	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
	<i>Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis</i>	100	587.782.000	
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			587.782.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	Jumlah Peraturan Gubernur Terkait Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jawa Tengah	1	587.782.000	SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI
<i>Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</i>			587.782.000	
	<i>Jumlah fasilitasi pembangunan simpul dan layanan transportasi strategis</i>	8	260.000.000	SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI
	<i>Jumlah Penyusunan (Review) dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</i>	1	327.782.000	SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	52,03	425.850.000	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			50.400.000	
	Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah III Kelas A	108405	50.400.000	SEKSI ANGKUTAN
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</i>			50.400.000	
	<i>Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	365	50.400.000	SEKSI ANGKUTAN
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			334.600.000	
	Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah III Kelas A	22	334.600.000	SEKSI ANGKUTAN
<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi</i>			334.600.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	<i>Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah III Kelas A</i>	11	334.600.000	SEKSI ANGKUTAN
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			40.850.000	
	Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah III Kelas A	564	40.850.000	SEKSI ANGKUTAN
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi</i>			40.850.000	
	<i>Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	10	20.000.000	SEKSI ANGKUTAN
	<i>Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	10	20.850.000	SEKSI ANGKUTAN
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	43,21	126.750.000	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			10.500.000	
	Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah II Kelas B	5733	10.500.000	KEPALA BALAI
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</i>			10.500.000	
	<i>Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	365	10.500.000	KEPALA BALAI

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			96.250.000	
	Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah II Kelas B	4	96.250.000	KEPALA BALAI
<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi</i>			96.250.000	
	<i>Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah II Kelas B</i>	2	96.250.000	KEPALA BALAI
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			20.000.000	
	Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah II Kelas B	296	20.000.000	KEPALA BALAI
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi</i>			20.000.000	
	<i>Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	6	10.000.000	KEPALA BALAI
	<i>Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	6	10.000.000	KEPALA BALAI
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	52,51	221.225.000	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			15.625.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah I Kelas A	34373	15.625.000	SEKSI ANGKUTAN
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</i>			15.625.000	
	<i>Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	365	15.625.000	SEKSI ANGKUTAN
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			180.600.000	
	Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah I Kelas A	8	180.600.000	SEKSI ANGKUTAN
<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi</i>			180.600.000	
	<i>Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah I Kelas A</i>	4	180.600.000	SEKSI ANGKUTAN
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			25.000.000	
	Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah I Kelas A	512	25.000.000	SEKSI ANGKUTAN
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi</i>			25.000.000	
	<i>Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	9	12.500.000	SEKSI ANGKUTAN

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	<i>Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	9	12.500.000	SEKSI ANGKUTAN
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	79,53	206.800.000	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			25.000.000	
	Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	24191	25.000.000	SEKSI ANGKUTAN
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</i>			25.000.000	
	<i>Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	365	25.000.000	SEKSI ANGKUTAN
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			151.800.000	
	Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	8	151.800.000	SEKSI ANGKUTAN
<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi</i>			151.800.000	
	<i>Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah IV Kelas A</i>	4	151.800.000	SEKSI ANGKUTAN
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			30.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	878	30.000.000	SEKSI ANGKUTAN
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi</i>			30.000.000	
	<i>Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	7	15.000.000	SEKSI ANGKUTAN
	<i>Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	7	15.000.000	SEKSI ANGKUTAN
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	84,23	262.590.000	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			21.990.000	
	Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	39781	21.990.000	SEKSI ANGKUTAN
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</i>			21.990.000	
	<i>Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	365	21.990.000	SEKSI ANGKUTAN
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			210.600.000	
	Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	10	210.600.000	SEKSI ANGKUTAN

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi</i>			210.600.000	
	<i>Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah VI Kelas A</i>	5	210.600.000	SEKSI ANGKUTAN
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			30.000.000	
	Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	1107	30.000.000	SEKSI ANGKUTAN
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi</i>			30.000.000	
	<i>Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	7	15.000.000	SEKSI ANGKUTAN
	<i>Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	7	15.000.000	SEKSI ANGKUTAN
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	66,43	200.200.000	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			15.500.000	
	Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah V Kelas B	50074	15.500.000	KEPALA BALAI
<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</i>			15.500.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	<i>Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	365	15.500.000	KEPALA BALAI
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			154.700.000	
	Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah V Kelas B	8	154.700.000	KEPALA BALAI
<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi</i>			154.700.000	
	<i>Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah V Kelas B</i>	4	154.700.000	KEPALA BALAI
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			30.000.000	
	Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah V Kelas B	845	30.000.000	KEPALA BALAI
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi</i>			30.000.000	
	<i>Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	6	15.000.000	KEPALA BALAI
	<i>Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	6	15.000.000	KEPALA BALAI

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	94,45	1.346.400.000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1.256.400.000	
	Jumlah penumpang angkutan umum yang terdata pada Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru	4406000	1.256.400.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi</i>			1.256.400.000	
	<i>Jumlah Pelayanan Posko Terpadu Angkutan lebaran, natal dan tahun baru</i>	28	1.256.400.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			40.000.000	
	Jumlah perusahaan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) yang mengajukan perizinan	15	40.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
<i>Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi</i>			40.000.000	
	<i>Jumlah fasilitasi dan sosialisasi angkutan lanjutan di simpul transportasi</i>	1	20.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
	<i>Jumlah fasilitasi dan sosialisasi layanan angkutan kawasan untuk mendukung kawasan pariwisata strategis</i>	1	20.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			50.000.000	
	Jumlah perusahaan AJDP yang di monitoring dan evaluasi	15	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi</i>			50.000.000	
	<i>Jumlah evaluasi kebutuhan pelayanan dan SPM angkutan orang tidak dalam trayek</i>	1	25.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
	<i>Jumlah pembinaan perusahaan angkutan orang tidak dalam trayek</i>	15	25.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
	Persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan	43,75	6.199.402.000	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B			6.199.402.000	
	Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek	14	6.199.402.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN
<i>Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B</i>			60.000.000	
	<i>Jumlah studi rencana pembangunan Terminal Penumpang Tipe B</i>	1	60.000.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN
<i>Pembangunan Gedung Terminal</i>			3.735.007.000	
	<i>Jumlah Pembangunan Terminal</i>	1	3.635.007.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN
	<i>Jumlah Pengadaan Tanah Terminal</i>	0		SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN
	<i>Jumlah Pengawasan Pembangunan Terminal</i>	1	100.000.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN
<i>Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal</i>			2.369.695.000	
	<i>Jumlah Penerapan Sistem Informasi</i>	0		SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN
	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemasangan CCTV</i>	0		SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	<i>Jumlah Pengawasan Pengembangan Terminal</i>	5	120.000.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN
	<i>Jumlah Pengembangan Terminal</i>	5	2.249.695.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN
<i>Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B</i>			34.700.000	
	<i>Jumlah Pembinaan penyelenggaraan Terminal Tipe B</i>	0		SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN
	<i>Jumlah Supervisi dan Bimbingan Teknis penyelenggaraan Terminal Tipe B</i>	4	34.700.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN
	Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	42,86	230.000.000	
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			180.000.000	
	Jumlah trayek angkutan aglomerasi perkotaan yang sudah dilayani	5	180.000.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN
<i>Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi</i>			70.000.000	
	<i>Jumlah Evaluasi peningkatan kapasitas kelembagaan balai transportasi Jateng</i>	0		SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN
	<i>Jumlah studi / kajian pengembangan angkutan aglomerasi</i>	1	70.000.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN
	<i>Jumlah Studi Review Maseterplan sistem angkutan massal</i>	0	-	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN
<i>Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi</i>			110.000.000	
	<i>Jumlah Peserta sosialisasi angkutan aglomerasi</i>	300	110.000.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN
	<i>Sosialisasi Dokumen review masterplan SAUM</i>	0	-	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampai 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			50.000.000	
	Jumlah trayek angkutan perintis yang terlayani	4	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN
<i>Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi</i>			50.000.000	
	<i>Jumlah Pelaksanaan fasilitasi angkutan perintis</i>	2	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			1.193.116.000	
	Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa	87,79	1.113.116.000	
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1.113.116.000	
	Jumlah Trip Pelayanan KMC Kartini I Lintas Semarang-Karimunjawa	14	1.113.116.000	SEKSI OPERASIONAL
<i>Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</i>			1.113.116.000	
	<i>Jumlah Perbaikan dan pemeliharaan KMC Kartini 1</i>	1	1.113.116.000	SEKSI OPERASIONAL
	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	51,12	80.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			80.000.000	
	Jumlah penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Baru / perubahan Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan	232	80.000.000	SEKSI ANGKUTAN LAUT
<i>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>			80.000.000	
	<i>Jumlah BAP Peninjauan lapangan dan Verifikasi izin yang diajukan oleh Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan</i>	50	80.000.000	SEKSI ANGKUTAN LAUT
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</i>			-	
	<i>Jumlah Appraisal KMC. Kartini I</i>	0		SEKSI ANGKUTAN LAUT

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	<i>Jumlah Bintek Penyelenggaraan dan perusahaan bongkar muat barang</i>	0	-	SEKSI ANGKUTAN LAUT
	<i>Jumlah Bintek Penyelenggaraan dan perusahaan Depo Peti Kemas</i>	0	-	SEKSI ANGKUTAN LAUT
	<i>Jumlah Bintek Penyelenggaraan dan perusahaan jasa pengurusan transportasi di perairan</i>	0	-	SEKSI ANGKUTAN LAUT
Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah			60.849.041.000	Dinas Perhubungan
	Nilai Kepuasan Masyarakat	80		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah			60.849.041.000	Dinas Perhubungan
	Nilai Sakip Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	71	400.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			400.000.000	
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	400.000.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			400.000.000	
	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	13	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>			300.000.000	
	<i>Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun</i>	9	300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			100.000.000	
	<i>Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD</i>	4	100.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM
Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah			60.849.041.000	Dinas Perhubungan
	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	60.449.041.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			60.449.041.000	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	100	434.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>			-	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA
Administrasi Umum Perangkat Daerah			26.500.000	
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	26.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>			7.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>			6.000.000	
	<i>Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	120	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>			10.500.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	12	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>				

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>			SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>			3.000.000	
	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			200.000.000	
	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Pengadaan Aset Tak Berwujud</i>			200.000.000	
	<i>Jumlah unit Aset Tak Berwujud (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.000.000	
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>			-	
	<i>Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>			5.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			202.500.000	
	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	12	202.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Pemeliharaan Aset Tak Berwujud</i>			200.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>				
	<i>Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>			SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>			2.500.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)</i>	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	100	582.600.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.000.000	
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>			2.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
Administrasi Umum Perangkat Daerah			121.400.000	
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	121.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>			44.500.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	12	44.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>			12.000.000	
	<i>Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	240	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>			11.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	12	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>			5.500.000	
	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	12	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>			48.400.000	
	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	12	48.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			43.200.000	
	<i>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	12	43.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>			-	
	<i>Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>			43.200.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	12	43.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			416.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	12	416.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>			406.000.000	
	<i>Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	2	406.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>			10.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)</i>	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	100	92.112.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.000.000	
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>			2.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			47.112.000	
	<i>Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	12	47.112.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>			35.500.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	12	35.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>			3.000.000	
	<i>Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	60	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>			2.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>			1.000.000	
	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>			5.612.000	
	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	12	5.612.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			7.000.000	
	<i>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>			-	
	<i>Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>			7.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			36.000.000	
	<i>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>			35.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	<i>Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>			1.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)</i>	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	100	324.840.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.000.000	
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>			2.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
Administrasi Umum Perangkat Daerah			57.840.000	
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	57.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>			37.500.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	12	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>			5.000.000	
	<i>Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>			4.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>			1.500.000	
	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>			9.840.000	
	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	12	9.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.000.000	
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>			-	
	<i>Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>			20.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			245.000.000	
	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	12	245.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>			241.000.000	
	<i>Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	2	241.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>			4.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)</i>	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	100	293.200.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.000.000	
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>			2.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
Administrasi Umum Perangkat Daerah			62.200.000	
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	62.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>			37.500.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	12	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>			5.000.000	
	<i>Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>			4.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>			1.500.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>			14.200.000	
	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	12	14.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25.000.000	
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>			-	
	<i>Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>			25.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			204.000.000	
	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	12	204.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>			195.000.000	
	<i>Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	3	195.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>			9.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)</i>	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	100	347.900.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.000.000	
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>			2.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
Administrasi Umum Perangkat Daerah			73.500.000	
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	73.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>			38.500.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	12	38.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>			6.000.000	
	<i>Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	120	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>			5.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>			2.000.000	
	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>			22.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	12	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26.400.000	
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>			-	
	<i>Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>			26.400.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	12	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			246.000.000	
	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	12	246.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>			241.000.000	
	<i>Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	2	241.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>			5.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)</i>	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	100	229.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>			2.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
Administrasi Umum Perangkat Daerah			64.280.000	
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	64.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>			36.500.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	12	36.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>			9.280.000	
	<i>Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	186	9.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>			3.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>			1.500.000	
	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>			14.000.000	
	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	12	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13.720.000	
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	13.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>			-	
	<i>Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>			13.720.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	12	13.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			149.000.000	
	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	12	149.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>			141.000.000	
	<i>Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	2	141.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>			8.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)</i>	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	100	58.145.389.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			42.946.083.000	
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	42.946.083.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>			42.194.583.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN</i>	12	42.194.583.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>			681.500.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (Kantor Dinas Perhubungan)</i>	12	681.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>			70.000.000	
	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun</i>	12	70.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			165.000.000	
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12	165.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>			165.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah</i>	12	165.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			125.000.000	
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>			-	
	<i>Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan</i>	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>			20.000.000	
	<i>Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>			105.000.000	
	<i>Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar</i>	20	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.043.000.000	
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	2.043.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>			20.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kantor Dinas Perhubungan)</i>	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>			58.000.000	
	<i>Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor</i>		-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	<i>Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (Kantor Dinas Perhubungan)</i>	1160	58.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>			50.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (Kantor Dinas Perhubungan)</i>	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>			200.000.000	
	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (Kantor Dinas Perhubungan)</i>	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>			90.000.000	
	<i>Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor (Kantor Dinas Perhubungan)</i>	12	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>			5.000.000	
	<i>Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD</i>	12	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>			60.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu</i>	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>			1.500.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah</i>	12	1.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>			60.000.000	
	<i>Jumlah laporan pelaksanaan SPBE</i>	3000	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			242.500.000	
	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	242.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>			-	
	<i>Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional</i>	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor</i>				
	<i>Jumlah Unit pengadaan Alat Angkutan Darat tak bermotor</i>	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Pengadaan Mebel</i>			5.000.000	
	<i>Jumlah unit pengadaan meubelair</i>	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>			-	
	<i>Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin</i>	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>			237.500.000	
	<i>Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya</i>	14	237.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10.836.406.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	10.836.406.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>			4.000.000	
	<i>Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (Kantor Dinas Perhubungan)</i>	12	4.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>			1.569.500.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD</i>	12	1.569.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>			9.262.906.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (Kantor Dinas Perhubungan)</i>	12	9.262.906.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.787.400.000	
	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	12	1.787.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>			687.400.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional</i>	12	687.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>			150.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>			700.000.000	
	<i>Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (Kantor Dinas Perhubungan)</i>	4	700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>			100.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)	Target Capaian/Anggaran		Penanggungjawab
		2023		
		Target	Rp	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (Kantor Dinas Perhubungan)</i>	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>			150.000.000	
	<i>Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor</i>	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
TOTAL			200.605.355.000	

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 merupakan target kinerja tahun ke-5 dari Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, yang memuat sasaran strategis indikator kinerja tugas fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah.

Tabel 2. 7 Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023 Perubahan

No	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Tujuan			
1.	Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah	Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	59,50%
Sasaran			
1.	Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	60,38 %
2.	Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	Persentase Pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	51,45 %
3.	Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi	Persentase operasional angkutan umum Aglomerasi yang nyaman dan handal	66,67 %
Tujuan			
2.	Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80
Sasaran			
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Sakip Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	71

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Perubahan

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2023 tersebut, Dinas Perhubungan mendapat dukungan anggaran dari APBD yang digunakan untuk melaksanakan 5 Program sebagai berikut.

Tabel 2. 8 Dukungan Anggaran dari APBD Dinas Perhubungan TA 2023 Perubahan

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 133.915.258.000,-	APBD
2. Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 2.586.116.000,-	APBD
3. Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 3.254.940.000,-	APBD
4. Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah	Rp. 60.849.041.000,-	APBD
TOTAL ANGGARAN	Rp. 200,605,355,000,-	

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja adalah Government Resources Management System Provinsi Jawa Tengah, (GRMS) adalah bangunan system aplikasi terintegrasi pemerintah provinsi jawa tengah. Sistem aplikasi yang terdiri atas; system e-budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling, e-monev dan gph, serta aplikasi networking terdiri atas; system cloud server, video/audio streaming, DNSX filter, voip gateway server, nms, ap controller, the dude dan inventarisasi pun mulai diterapkan di Provinsi Jawa Tengah. Muara dalam system ini adalah integrasi antar data didalam proses bisnis internal birokrasi yang notabene merupakan system pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan public dan pembangunan sehingga tercipta monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi secara real-time.

Selain itu terdapat aplikasi yang digunakan secara internal untuk monitoring dan evaluasi kinerja berbasis Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Kegiatan berbasis teknologi informasi berupa Sistem Informasi Pengendalian Kegiatan berbasis e Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Kegiatan (**Pake-Siska**). Aplikasi ini digunakan sebagai pengumpulan data kinerja dan alat untuk monitoring pelaksanaan kegiatan yang menyajikan data pelaksanaan kegiatan secara actual, cepat dan mudah diakses dalam rangka pencapaian akuntabilitas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam hal Pemetaan Simpul dan Fasilitas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Secara Geografis Dinas Perhubungan membangun sistem aplikasi berupa Informasi Geografis yang memuat sebaran lokasi, rencana kebutuhan dan kondisi eksisting terkait simpul transportasi berupa Terminal tipe B, Perlintasan sebidang Kereta Api, shelter BRT, Daerah Rawan Kecelakaan, Area Traffic Management System dan perlengkapan jalan yang menjadi sumber data perencanaan program kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Produk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori Tingkat Ketercapaian Kinerja	Interval Nilai Realisasi Kinerja
1	Sangat Baik	> 100%;
2	Baik	85 – 100%;
3	Cukup	65 – 84,99%;
4	Kurang	50 - 64,99%;
5	Sangat Kurang	< 50, %

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. sebagaimana berikut :

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Persentase	
A	MEMANTAPKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG	Persentase pelayanan	%	59,50	63,45	106,64	44,37

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Persentase	
	BERORIENTASI PADA KONEKTIVITAS ANTAR KAWASAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH	Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah					
1	MENINGKATNYA LAYANAN JARINGAN DISTRIBUSI TRANSPORTASI	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	60,38	73,89	122,38	51,56
2	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	51,45	49,81	96,81	28,22
3	MENINGKATNYA KUALITAS ANGKUTAN UMUM AGLOMERASI	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	66,67	66,67	100,00	53,33
B	MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	80,13	100,16	79
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	80,13	100,16	79
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Sakip Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	71	82,05	115,56	77,71

Dari tabel diatas diketahui bahwa Realisasi capaian Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 telah mencapai nilai yang ditargetkan. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur perhubungan di Jawa Tengah serta mendukung Ketercapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan didukung melalui 3 program, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Pengelolaan Perkeretaapian.

3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan "Sangat Baik" yaitu dengan capaian tujuan 1 : memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di provinsi jawa tengah dengan Indikator persentase pelayanan transportasi antar kawasan pengembangan di provinsi jawa tengah sebesar 106,64 % dan capaian tujuan 2 : meningkatnya tata kelola organisasi dinas perhubungan

provinsi jawa tengah dengan tingkat capaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 100,16 %. sebagaimana berikut :

Tabel 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Katagori
A	MEMANTAPKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG BERORIENTASI PADA KONEKTIVITAS ANTAR KAWASAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH	Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	%	59,50	63,45	106,64	Sangat Baik
1	MENINGKATNYA LAYANAN JARINGAN DISTRIBUSI TRANSPORTASI	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	60,38	73,89	122,38	Baik
2	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	51,45	49,81	96,81	Baik
3	MENINGKATNYA KUALITAS ANGKUTAN UMUM AGLOMERASI	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	66,67	66,67	100,00	Sangat Baik
B	MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	80,13	100,16	Sangat Baik
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	80,13	100,16	Sangat Baik
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Sakip Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	71	82,05	115,56	Sangat Baik

Dari tabel diatas diketahui bahwa Tingkat Ketercapaian Kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dalam urusan Perhubungan dan Urusan Penunjang masuk katagori sangat baik.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	MEMANTAPKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG BERORIENTASI PADA KONEKTIVITAS ANTAR KAWASAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH	Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	%	25,59	26,21	102,42	30,01	30,01	100	36,31	37,08	102,12	39,38	43,61	110,74	59,50	63,45	106,64
1	MENINGKATNYA LAYANAN JARINGAN DISTRIBUSI TRANSPORTASI	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	34,75	36,02	103,65	37,84	37,84	100	42,64	43,38	101,73	47,74	54,99	115,17	60,38	73,89	122,38
2	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	8,69	9,26	106,56	12,19	12,85	105,41	19,62	21,18	107,95	23,73	29,19	123,01	51,45	49,81	96,81
3	MENINGKATNYA KUALITAS ANGKUTAN UMUM AGLOMERASI	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman	%	33,33	33,33	100	40,00	40,00	100	46,67	46,67	100,00	46,67	46,67	100,00	66,67	66,67	100,00

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		dan handal																
B	MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	65,13	74,84	114,91	67,73	77,65	115%	70,33	78,28	111,30	78,5	79,75	101,59	80	80,13	100,16
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	60	74	123,33	65	78	120	70	79,25	113,21	78,5	79,75	101,59	80	80,13	100,16
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Sakip Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	70,25	75,68	107,73	70,45	77,31	110	70,65	77,31	109,43	77,51	78,18	100,86	71	82,05	115,56

Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya baik dalam urusan Pemerintah Bidang Perhubungan dan Penunjangurusan Pemerintahan Daerah. Untuk capaian kinerja pertahunnya selama 3 (tiga) tahun selalu tercapai dengan tingkat capaian $\geq 100\%$.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagaimana berikut

Tabel 3. 5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Analisis Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
A	MEMANTAPKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG BERORIENTASI PADA KONEKTIVITAS ANTAR KAWASAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH	Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	%	63,45	59,50	106,64		
1	MENINGKATNYA LAYANAN JARINGAN DISTRIBUSI TRANSPORTASI	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	73,89	60,38	122,38	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan bus AKDP dan kemudahan pengurusan izin • Diterbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta adanya sistem sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) pada perizinan angkutan laut sehingga para pengusaha dapat dengan mudah dan cepat dalam melakukan pengurusan SIUP baru dan atau perubahan 	

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Analisis Keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilakukan
							<ul style="list-style-type: none"> koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien 	
2	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	49,81	51,45	96,81	<ul style="list-style-type: none"> Dinamika di lapangan diantaranya penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Forum LLAJ, rekomendasi KNKT dan bantuan teknis dari Kementerian Perhubungan Koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien 	
3	MENINGKATNYA KUALITAS ANGKUTAN UMUM AGLOMERASI	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	66,67	66,67	100,00	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien 	
B	MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,13	80	100,16		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,13	80	100,16	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana Terminal Type B 	

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Analisis Keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilakukan
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Sakip Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	82,05	71	115,56	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien Peningkatan kualitas Monev melalui penerapan Teknologi IT 	

Sesuai dengan tabel tersebut kinerja dinas perhubungan masuk dalam katagori sangat baik karena hal tersebut didukung oleh faktor sebagaimana tabel.

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran terdapat alokasi anggaran sehingga perlu adanya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebagaimana tabel.

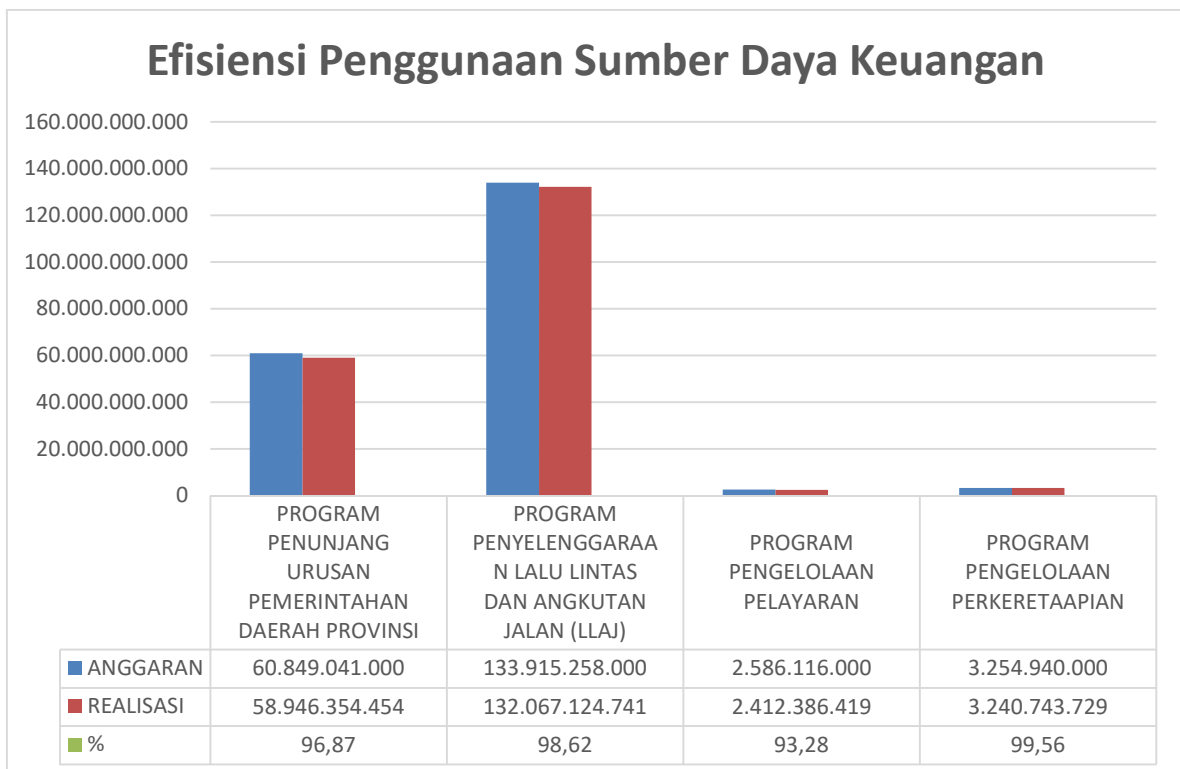
Tabel 3. 6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
A	MEMANTAPKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG BERORIENTASI PADA KONEKTIVITAS ANTAR KAWASAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH	Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	63,45	59,50	106,64	139.756.314.000	137.720.254.889	98.54	1.46
1	MENINGKATNYA LAYANAN JARINGAN DISTRIBUSI TRANSPORTASI	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	73,89	60,38	122,38	11.050.115.000	10.828.614.954	98,00	2,00
2	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan	49,81	51,45	96,81	22.763.345.000	22.295.323.649	97,94	2,06

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	TRANSPORTASI	transportasi							
3	MENINGKATNYA KUALITAS ANGKUTAN UMUM AGLOMERASI	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	66,67	66,67	100,00	105.942.854.000	104.596.316.286	98,73	1,27
B	MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai Kepuasan Masyarakat	80,13	80	100,16	60.849.041.000	58.946.354.454	96,87	3,13
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80,13	80	100,16	60.449.041.000	58.557.985.454	96,87	3,13
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Sakip Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	82,05	71	115,56	400.000.000	388.369.000	97,09	2,91

Dalam rangka pencapaian tujuan 1 (satu) Memantapkan Sistem Transportasi yang Berorientasi pada Konektivitas antar Kawasan Pengembangan Di Provinsi Jawa Tengah terealisasi anggaran sebesar Rp 137,720,254,889 atau 98,54% dari total pagu sebesar Rp 139,756,314,000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,4% dari Pagu yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 2,036,059,111. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Efisiensi juga terjadi dalam pencapaian sasaran yang mendukung tujuan tersebut.

Untuk pencapaian tujuan 2 (dua) Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terealisasi anggaran sebesar Rp 58,946,354,454 atau 96,87% dari total pagu sebesar Rp 60,849,041,000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,13% dari Pagu yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 1,902,686,546. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai dilihat dari meningkatnya nilai SKM dan SAKIP Dinas Perhubungan, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Efisiensi juga terjadi dalam pencapaian sasaran yang mendukung tujuan tersebut.



Gambar 3. 1 Grafik Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)** untuk pencapaian sasaran, adalah sebesar Rp 132.067.124.741 atau 98,62% dari total pagu sebesar Rp 133.915.258.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,38% dari Pagu yang dianggarkan. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Efisiensi terjadi diantaranya karena Koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien antara lain adanya penambahan pemasangan dan penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Forum LLAJ, rekomendasi KNKT dan bantuan teknis dari Kementerian Perhubungan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada **Program Pengelolaan Pelayaran** untuk pencapaian sasaran, adalah sebesar Rp 2.412.386.419 atau 93,28% dari total pagu sebesar Rp 2.586.116.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,72% dari Pagu yang dianggarkan. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Efisiensi terjadi diantaranya Diterbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta adanya sistem sistem Online Single Submission Risk Based

Approach (OSS-RBA) pada perizinan angkutan laut sehingga para pengusaha dapat dengan mudah dan cepat dalam melakukan pengurusan SIUP baru dan atau perubahan, serta efisiensi kegiatan pemeliharaan KMC Kartini 1 difokuskan hanya untuk pemeliharaan yang berfungsi untuk mempertahankan nilai aset.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada **Program Pengelolaan Perkeretaapian** untuk pencapaian sasaran, adalah sebesar Rp 3.240.743.729 atau 99,56% dari total pagu sebesar Rp 3.254.940.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,44% dari Pagu yang dianggarkan. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi, efisiensi tersebut berasal dari adanya bantuan teknis hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang Kereta Api.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada **Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah** untuk pencapaian sasaran, adalah sebesar Rp 58.946.354.454 atau 96,87% dari total pagu sebesar Rp 60.849.041.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,13% dari Pagu yang dianggarkan. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Efisiensi tersebut berasal dari Pelaksanaan diklat dilaksanakan secara virtual untuk meminimalisir tingkat penularan virus covid-19, Efisiensi Belanja Telepon, Air dan Listrik dan sisa anggaran kontrak.

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian Tujuan 1 : Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di provinsi jawa tengah.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan "Sangat Baik" yaitu dengan capaian tujuan 1 : memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah dengan Indikator persentase pelayanan transportasi antar kawasan pengembangan di provinsi jawa tengah sebesar 106,64 %. Dalam tujuan 1 (satu) memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar

kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah didukung oleh 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) program.

Capaian Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan "Sangat Baik" yaitu dengan capaian tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan Indikator persentase Nilai Kepuasan Masyarakat sebesar 100,16% dengan realisasi nilai kepuasan masyarakat sebesar 80,13 dari target 80. Dalam tujuan 2 (dua) Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 1 (satu) program. Tingkat ketercapaian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	Tujuan/Sasaran/Program / Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Menunjang/Tidak Menunjang
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)	
A	TUJUAN : MEMANTAPKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG BERORIENTASI PADA KONEKTIVITAS ANTAR KAWASAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH					
	Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	%	59,50	63,45	106,64	
1	SASARAN : MENINGKATNYA LAYANAN JARINGAN DISTRIBUSI TRANSPORTASI					
	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	60,38	73,89	122,38	
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
	Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	%	5,68	5,68	100	Menunjang
	Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	%	94,45	193,89	205,28	Menunjang
	Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	%	42,86	42,86	100	Menunjang
	Persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan	%	43,75	43,75	100	Menunjang
	Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	52,51	52,72	100,4	Menunjang

	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	43,21	43,5	100,67	Menunjang
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	52,03	52,21	100,35	Menunjang
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	79,53	79,89	100,45	Menunjang
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	66,43	66,59	100,24	Menunjang
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	84,23	84,23	100	Menunjang
1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	%	51,12	51,12	100	Menunjang
	Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa	%	87,79	88,28	100,56	Menunjang
2	SASARAN : MENINGKATNYA KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI					
	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	51,45	49,81	96,81	Menunjang
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	%	52,34	38,66	73,86	Menunjang
	Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	%	18,52	12,99	70,14	Menunjang
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	31,25	37,5	120	Menunjang
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	50	60	120	Menunjang
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	62,5	68,75	110	Menunjang
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	38,46	42,31	110,01	Menunjang
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V	%	76,92	84,62	110,01	Menunjang

	Kelas B					
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	34,48	44,83	130,02	Menunjang
2.2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
	Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang	%	75	75	100	Menunjang
2.3	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					
	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	%	45,45	45,45	100	Menunjang
3	SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS ANGKUTAN UMUM AGLOMERASI					
	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	66,67	66,67	100,00	Menunjang
3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
	Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	%	34,85	34,85	100	Menunjang
Total Indikator Program					24	
Total Sangat Tinggi					22	
Total Tinggi					0	
Total Sedang					2	
Total Rendah					0	
Total Sangat Rendah					0	
NO	Tujuan/Sasaran/Program / Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Menunjang/Tidak Menunjang
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)	
A	TUJUAN : MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH					
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	80,13	100,16	
1	SASARAN : Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah					
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	80,13	100,16	
1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	%	100	100	100	Menunjang

NO	Tujuan/Sasaran/Program / Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Menunjang/Tidak Menunjang
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	%	100	100	100	Menunjang
2	SASARAN : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah					
	Nilai Sakip Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	nilai	82,05	71	115,56	Menunjang
2.1	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	Menunjang
	Total Indikator				9	
	Total Sangat Tinggi				9	
	Total Tinggi				0	
	Total Sedang				0	
	Total Rendah				0	
	Total Sangat Rendah				0	

Sumber : e-controlling 2023

TUJUAN 1 : MEMANTAPKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG BERORIENTASI PADA KONEKTIVITAS ANTAR KAWASAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

a. Capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Jaringan Distribusi Transportasi

Sasaran berupa Meningkatnya Layanan Jaringan Distribusi Transportasi dengan indikator Persentase layanan jaringan distribusi transportasi capaiannya 122,38% dengan realisasi 60,38% dari target 73,89%. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayanan dengan ketercapaian sebagaimana berikut :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

mempunyai 10 (sepuluh) indikator yang mendukung capaian Sasaran 1 : Meningkatkan Layanan Jaringan Distribusi Transportasi dengan tingkat ketercapaian indikator

Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM capaiannya 100% dengan realisasi 5,68% dari target 5,68%, Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru capaiannya 205,28% dengan realisasi 193,89% dari target 94,45%, Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis capaiannya 100% dengan realisasi 42,86% dari target 42,86%, Persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan capaiannya 100% dengan realisasi 43,75% dari target 43,75%, Persentase Fasilitas pembangunan infrastruktur transportasi strategis capaiannya 100% dengan realisasi 100% dari target 100%, Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A capaiannya 100,4% dengan realisasi 52,72% dari target 52,51%, Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B capaiannya 100,67% dengan realisasi 43,5% dari target 43,21%, Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A capaiannya 100,35% dengan realisasi 52,21% dari target 52,03%, Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A capaiannya 100,45% dengan realisasi 79,89% dari target 79,53%, Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B capaiannya 100,24% dengan realisasi 66,59% dari target 66,43%, Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A capaiannya 100% dengan realisasi 84,23% dari target 84,23%.

Ketercapaian pada indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) masuk dalam katagori **sangat tinggi** hal ini dipengaruhi adanya Ketercapaian pada indikator Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum melebihi dari target yang ditetapkan disebabkan karena dipengaruhi adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan bus AKDP serta kemudahan dalam pengurusan izin, sementara untuk indikator Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan realisasinya melebihi target disebabkan karena adanya dinamika di lapangan diantaranya penanganan Daerah

Rawan Kecelakaan (DRK) yang merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ), rekomendasi Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) dan bantuan teknis dari Kementerian Perhubungan.

Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan sampai dengan tahun 2023 terealisasi sesuai target melalui pembangunan terminal Kutoarjo dan peningkatan di 3 terminal (Terminal Gagakrimang Kab. Blora, Penggung Kab. Boyolali dan Banyuputih Kab. Batang). Trayek angkutan aglomerasi dan perintis sampai dengan tahun 2023 terealisasi 7 trayek (sesuai dengan target).



Gambar 3. 2 Peresmian BRT Trans Jateng Koridor Solo-Wonogiri Tahun 2023



Gambar 3. 3 Pembangunan Terminal Kutoarjo

Program Pengelolaan Pelayaran mempunyai 2 (dua) indikator yang mendukung capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Jaringan Distribusi Transportasi dengan tingkat ketercapaian indikator Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin capaiannya 100% dengan realisasi 51,12% dari target 51,12%, Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa capaiannya 100,56% dengan realisasi 88,28% dari target 87,79%. Ketercapaian pada indikator Program Pengelolaan Pelayaran masuk dalam katagori **sangat tinggi** hal ini dipengaruhi adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan. Jumlah perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin sampai dengan tahun 2023 terealisasi 274 dokumen (Jasa Pengurusan Transportasi, Depo Peti Kemas dan Bongkar Muat) serta bertambahnya peminat wisatawan untuk mengunjungi Pulau Karimunjawa sehingga membuat beberapa jadwal reguler penyeberangan menuju Karimunjawa baik dari Semarang dan Jepara bertambah diantaranya dilayani oleh Kapal Cepat Bahari Express, Kapal Siginjai dan Kapal Kelimutu.

Kendala dalam penyelenggaraan program pengelolaan pelayaran diantaranya adalah tidak tersedianya alternatif penggunaan moda selain kapal yang mana jadwal keberangkatan kapal sangat bergantung pada cuaca, selain itu penghentian operasional rute Penerbangan menggunakan pesawat udara dari Semarang – Karimunjawa akibat adanya Covid 19 dan pekerjaan peningkatan Terminal Bandara Dewadaru serta tidak beroperasinya KMC Kartini I yang telah memasuki usia pakai.

b. Capaian Sasaran 2 : Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi

Sasaran berupa Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi capaiannya 96,81% dengan realisasi 49,81% dari target 51,45%. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan ketercapaian sebagaimana berikut :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai 8 (delapan) indikator yang mendukung capaian Sasaran 2 :

Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi dengan tingkat ketercapaian indikator

Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang capainya 73,86% dengan realisasi 38,66% dari target 52,34%, Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan capainya 70,14% dengan realisasi 12,99% dari target 18,52%, Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A capainya 120% dengan realisasi 37,5% dari target 31,25%, Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B capainya 120% dengan realisasi 60% dari target 50%, Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A capainya 110% dengan realisasi 68,75% dari target 62,5% Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A capainya 110,01% dengan realisasi 42,31% dari target 38,46%, Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B capainya 110,01% dengan realisasi 84,62% dari target 76,92%, Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A capainya 130,02% dengan realisasi 44,83% dari target 34,48%.

Ketercapaian pada indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) masuk dalam katagori **sangat baik**. Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan sampai dengan tahun 2023 terealisasi 70 lokasi dari target 62 lokasi karena pada TA. 2023 dilakukan rehabilitasi di lokasi Daerah Rawan Kecelakaan.



Gambar 3. 4 Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan BPSPP Wilayah VI



Gambar 3. 5 Pemasangan Perlengkapan Jalan



Gambar 3. 6 Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan BPSPP Wilayah III

Program Pengelolaan Pelayaran mempunyai 1 (satu) indikator yang mendukung capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi dengan tingkat ketercapaian indikator

Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang capaiannya 100% dengan realisasi 75% dari target 75%. Ketercapaian pada indikator Program Pengelolaan Pelayaran masuk dalam katagori **sangat tinggi** dengan fasilitas keselamatan pelayaran terpasang sampai dengan tahun 2023 terealisasi 3 (tiga) unit (sesuai dengan target) karena pada TA. 2023 dilakukan pemasangan di 3 (tiga) lokasi.



Gambar 3. 7 LPJU Terpasang di Dermaga Sungai

Program Pengelolaan Perkeretaapian mempunyai 1 (satu) indikator yang mendukung capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi dengan tingkat ketercapaian indikator Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api capaiannya 100% dengan realisasi 45,45% dari target 45,45%. Ketercapaian pada indikator Program Pengelolaan Perkeretaapian masuk dalam katagori sangat tinggi dengan fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api sampai dengan tahun 2023 terealisasi 4 (empat) lokasi (sesuai dengan target) di ruas jalan Provinsi yang bersilangan dengan jalur Kereta Api berada di Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Sragen dan Grobogan.



Gambar 3. 8 Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang (EWS)

c. Capaian Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi

Sasaran berupa Meningkatnya Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi dengan indikator Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal capaiannya 100% dengan realisasi 66,67% dari target 66,67%. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan ketercapaian sebagaimana berikut :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

mempunyai 1 (satu) indikator yang mendukung capaian Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi dengan tingkat ketercapaian indikator Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi capaiannya 100% dengan realisasi 34,85% dari target 34,85%. Ketercapaian pada indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) masuk dalam katagori **sangat tinggi**. Trayek angkutan aglomerasi dan perintis sampai dengan tahun 2023 terealisasi 7 trayek 112 bus dengan trayek dan jumlah bus tersebut, Angkutan Umum Aglomerasi mempunyai headway 20 menit.



Gambar 3. 9 Tampilan Si-Anteng untuk menunjang indikator Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi

TUJUAN 2 : MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

a. Capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat capaiannya 100,16% dengan realisasi 80,13 dari target 80 Ketercapaian Sasaran didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan ketercapaian sebagaimana berikut :

Dari Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut, survei Kepuasan

Masyarakat dilaksanakan pada 7 koridor unit pelayanan BRT Trans Jateng dengan jumlah populasi 4.627 orang, pada 24 terminal unit pelayanan Terminal Tipe B di Provinsi Jawa Tengah dengan Jumlah Populasi 4.620 orang serta pada 6 balai unit pelayanan Pembaharuan Izin KPKJP di Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah dengan jumlah populasi 217 Badan Usaha. Teknik penarikan sampel Survei Kepuasan Masyarakat ini dengan menggunakan rumus Krejcie and Morgan dengan keterwakilan sampel pada unit pelayanan BRT Trans Jateng 722 sampel (7 koridor), unit pelayanan Terminal Tipe B 1.251 sampel (22 terminal) dan unit pelayanan pembaharuan izin KPKJP di Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah 195 sampel (6 BPSPP Wilayah). Dari Survei Kepuasan Masyarakat dapat digambarkan rata – rata IKM pada Tahun 2023 untuk masing – masing pelayanan publik di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah nilai hasil IKM 80,13 dengan mutu pelayanan B atau baik kinerjanya. Nilai IKM ini cenderung tetap dari penilaian tahun sebelumnya.

b. Capaian Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan kegiatan evaluasi SAKIP tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan dan RB) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , pelaksanaan evaluasi SAKIP telah dilakukan di 41 SKPD diantaranya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan evaluasi yang dilakukan diantaranya mencari informasi terkait penerapan SAKIP serta melakukan penilaian SAKIP. Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 82,05 termasuk dalam katagori penilaian A (Memuaskan) dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa Dinas Perhubungan dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. Nilai hasil evaluasi tersebut berasal dari 4 (empat) komponen yang dinilai yaitu perencanaan kinerja mendapatkan nilai 22,80 dari bobot penilaian sebesar 30%, Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 26,10 dari bobot penilaian sebesar 30%, Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 12,15 dari bobot penilaian sebesar 15% dan Evaluasi Kinerja mendapatkan nilai 21,00 dari bobot penilaian sebesar 25%. Serta disarankan perbaikan dari hasil LHE yaitu:

- Menyelaraskan indikator dan target kinerja sasaran dokumen Perencanaan Kinerja.

- Pakta Integritas agar dilaksanakan sampai dengan seluruh pegawai.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja yang telah disusun agar dilengkapi dengan simbol-simbol yang akhirnya akan mengarah pada terbentuknya diagram alur yang menggambarkan aliran aktivitas atau kegiatan masing-masing unit organisasi.
- Dalam setiap Notulen Rakor POK agar diberikan catatan solusi/rekomendasi atas permasalahan/kendala yang dihadapi.
- Pada penyusunan Dokumen LKjIP Tahun 2023 analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja agar diperjelas efisiensinya.

Rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti **sebagaimana tabel 2.2 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023.**

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2023, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 200.605.355.000,- dan terelasisasi sebesar 196.666.609.343,- (98,04%). Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN
Dinas Perhubungan	200.605.355.000	196.666.609.343	98,04
Sekretariat - Dinas Perhubungan	58.545.389.000	56.715.774.367	96,87
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	58.545.389.000	56.715.774.367	96,87
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	388.369.000	97,09
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.946.083.000	41.875.356.660	97,51
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	165.000.000	164.594.000	99,75
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.000.000	48.258.500	38,61
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.043.000.000	1.962.186.418	96,04
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	242.500.000	241.795.000	99,71
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.836.406.000	10.343.181.334	95,45
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.787.400.000	1.692.033.455	94,66
Bidang Lalu Lintas	8.267.375.000	8.147.743.600	98,55
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8.267.375.000	8.147.743.600	98,55
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	6.996.264.000	6.901.278.600	98,64
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	911.111.000	903.132.000	99,12
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	125.000.000	124.651.000	99,72

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	235.000.000	218.682.000	93,06
Bidang Angkutan Jalan	1.626.400.000	1.582.301.920	97,29
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.626.400.000	1.582.301.920	97,29
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.256.400.000	1.227.315.500	97,69
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	180.000.000	169.147.100	93,97
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	47.746.900	95,49
Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.000.000	39.255.220	98,14
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	49.896.900	99,79
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	48.940.300	97,88
Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	10.042.124.000	10.006.546.144	99,65
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.787.184.000	6.765.802.415	99,68
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	587.782.000	581.223.290	98,88
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	6.199.402.000	6.184.579.125	99,76
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	3.254.940.000	3.240.743.729	99,56
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	3.254.940.000	3.240.743.729	99,56
Bidang Pelayaran	1.473.000.000	1.432.610.800	97,26
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.473.000.000	1.432.610.800	97,26
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	80.000.000	80.000.000	100
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	155.000.000	154.837.500	99,9
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.238.000.000	1.197.773.300	96,75
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	1.815.395.000	1.773.702.200	97,7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	324.840.000	318.345.000	98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.000	1.550.000	77,5
Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.840.000	57.840.000	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	20.000.000	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.000.000	238.955.000	97,53
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.490.555.000	1.455.357.200	97,64
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.269.330.000	1.235.392.200	97,33

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	15.625.000	15.625.000	100
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	180.600.000	180.600.000	100
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.000.000	23.740.000	94,96
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	2.098.542.000	2.035.011.094	96,97
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	92.112.000	90.864.994	98,65
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.112.000	47.111.994	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.000.000	6.568.000	93,83
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.000.000	35.185.000	97,74
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.006.430.000	1.944.146.100	96,9
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.879.680.000	1.828.516.100	97,28
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	10.500.000	10.500.000	100
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	96.250.000	85.130.000	88,45
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.000.000	20.000.000	100
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	2.769.230.000	2.690.332.048	97,15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	582.600.000	561.094.448	96,31
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.000	1.550.000	77,5
Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.400.000	105.794.800	87,15
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.200.000	41.400.000	95,83
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	416.000.000	412.349.648	99,12
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.186.630.000	2.129.237.600	97,38
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.760.780.000	1.713.607.600	97,32
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	50.400.000	50.400.000	100
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	334.600.000	324.520.000	96,99
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.850.000	40.710.000	99,66
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	2.283.330.000	2.182.301.400	95,58
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	293.200.000	290.475.000	99,07
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.200.000	61.745.000	99,27
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000	25.000.000	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.000.000	201.730.000	98,89
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.990.130.000	1.891.826.400	95,06
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.783.330.000	1.685.106.400	94,49
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	25.000.000	25.000.000	100

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	151.800.000	151.720.000	99,95
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	30.000.000	30.000.000	100
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	1.702.430.000	1.671.429.120	98,18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	229.000.000	219.346.800	95,78
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.000	1.550.000	77,5
Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.280.000	61.976.800	96,42
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.720.000	7.560.000	55,1
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.000.000	148.260.000	99,5
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.473.430.000	1.452.082.320	98,55
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.273.230.000	1.251.882.320	98,32
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	15.500.000	15.500.000	100
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	154.700.000	154.700.000	100
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	30.000.000	30.000.000	100
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	2.492.170.000	2.437.334.670	97,8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	347.900.000	335.023.770	96,3
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.000	1.550.000	77,5
Administrasi Umum Perangkat Daerah	73.500.000	62.829.770	85,48
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.400.000	26.400.000	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.000.000	244.244.000	99,29
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.144.270.000	2.102.310.900	98,04
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.881.680.000	1.839.720.900	97,77
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	21.990.000	21.990.000	100
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	210.600.000	210.600.000	100
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	30.000.000	30.000.000	100
Balai Transportasi Jawa Tengah	107.489.970.000	105.991.521.980	98,61
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	434.000.000	415.430.075	95,72
Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.500.000	14.459.925	54,57
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000	198.717.750	99,36
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000	2.228.400	44,57
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.500.000	200.024.000	98,78
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	105.942.854.000	104.596.316.286	98,73
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.833.020.000	1.812.895.736	98,9
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	104.109.834.000	102.783.420.550	98,73

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
		ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.113.116.000	979.775.619	88,02
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.113.116.000	979.775.619	88,02

3.3 Inovasi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya pembaharuan agar dapat mencapai kinerja dinas. Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah berinovasi terhadap beberapa sistem yang ada, dalam hal ini inovasi pada pengembangan sistem. Pengembangan aplikasi Si Anteng untuk mempermudah pengguna Trans Jateng mengetahui informasi posisi bus secara real time dan letak halte terdekat, serta upgrade aplikasi operating system untuk IOS dan APPLE serta penambahan fitur pembayaran tiket online pada aplikasi SiAnteng yang bekerjasama dengan Astrapay. Aplikasi SiAnteng meningkatkan kemudahan bagi pengguna BRT Trans Jateng yang berimplikasi positif meningkatkan kinerja Program Pengembangan Angkutan Umum Aglomerasi (BRT Trans Jateng) dimana kegunaannya adalah untuk mengetahui informasi layanan Trans Jateng, menyampaikan feedback berupa kritik dan saran, serta informasi atau pengumuman adanya perubahan layanan Trans Jateng yang bermanfaat memudahkan pemantauan dan pengawasan operasional Trans Jateng.



Gambar 3. 10 Aplikasi Si-Anteng

3.4 Penghargaan

Sebagai wujud kinerja nyata urusan perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023 memperoleh penghargaan tingkat Nasional yaitu Penghargaan dari Kakorlantas Polri kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah atas dukungan dan sumbangsih dalam pengembangan implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Nasional Presisi pada acara Rakernis fungsi lintas tahun 2023.



Gambar 3. 11 Penghargaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Nasional Presisi

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018-2023, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah pada periode Tahun 2018-2023 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh "Isu Strategis" sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Isu strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang Perhubungan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan tercapai dengan Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai 2 (dua) tujuan dan 5 sasaran, yaitu

Tujuan Pertama : Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah, dengan sasaran sebagai berikut :

- a) Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Jaringan Distribusi Transportasi dengan indikator Persentase layanan jaringan distribusi transportasi capaiannya 122,38% dengan realisasi 73,89% dari target 60,38%. Ketercapaian Sasaran didukung oleh : 2 (dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran.
- b) Sasaran 2 : Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi

capaiannya 96,81% dengan realisasi 49,81% dari target 51,45%. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Pengelolaan Perkeretaapian;

- c) **Sasaran 3** : Meningkatnya Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi dengan indikator Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal capaiannya 100 % dengan realisasi 66,67% dari target 66,67%. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan ketercapaian kinerja 100% sesuai target yaitu Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi.

Tujuan Kedua : Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, dengan sasaran sebagai berikut :

- a) **Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Dari Survei Kepuasan Masyarakat dapat digambarkan IKM pada Tahun 2023 untuk masing – masing pelayanan publik di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah nilai hasil IKM 80,13 dengan mutu pelayanan B atau baik kinerjanya.
- b) **Sasaran 2** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 82,05 meningkat dari tahun 2022 nilai 78.18, termasuk dalam kategori penilaian A (Memuaskan).
2. Tingkat capaian kinerja pada tujuan 1 Dinas Perhubungan tahun 2023 sebesar 106,64% atau sangat baik karena terdapat peningkatan outcome pada indikator Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum melebihi target disebabkan karena dipengaruhi adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan bus AKDP serta kemudahan dalam pengurusan izin dan untuk indikator Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan disebabkan karena dinamika di lapangan diantaranya penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Forum LLAJ, rekomendasi KNKT dan bantuan teknis dari Kementerian Perhubungan, meningkatnya wisatawan untuk mengunjungi Pulau Karimunjawa membuat beberapa jadwal reguler penyeberangan menuju Karimunjawa meningkat diantaranya Kapal Cepat Bahari Express, Kapal Siginjai dan Kapal Kelimutu.

3. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dengan menggunakan anggaran kurang dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 196.666.609.343 atau (98,04%) dari total anggaran sebesar Rp. 200.605.355.000 namun realisasi fisik tercapai 100%.
4. Beberapa tantangan terkait pelaksanaan program / kegiatan dalam penyelesaian issue strategis pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
 - a) Penerapan OSS dibarengi Peningkatan kesadaran masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan AKDP dan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan.
 - b) Kesenjangan wilayah terkait dengan ruang pergerakan, konektivitas dan simpul transportasi antara desa-kota maupun antara kota-kota (kawasan aglomerasi perkotaan) dan antar wilayah utamanya aksesibilitas – konektivitas wilayah Pantura – Pansela dan wilayah tengah Jawa Tengah.
 - c) Tingginya kecelakaan lalu lintas akibat kurangnya fasilitas perlengkapan jalan di ruas Jalan Provinsi dan Persilangan Kereta Api.
 - d) Tidak beroperasinya KMC Kartini I yang telah memasuki usia pakai sebagai Kendala dalam penyelenggaraan program pengelolaan pelayaran terkait konektivitas dan keselamatan pelayaran.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kegiatan fasilitasi OSS RBA bagi pelaku usaha;
2. Peningkatan kualitas layanan BRT Trans Jateng dalam menjangkau kawasan aglomerasi wilayah di Jawa Tengah;
3. Pelaksanakan FGD dan koordinasi dengan stakeholder terkait mendukung pembangunan simpul dan layanan transportasi strategis, Pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan, Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Jawa Tengah dengan Pemerintah Pusat serta stakeholders terkait forum lalu lintas dan angkutan Jalan;
4. Percepatan pelaksanaan Penghapusan aset Kapal Motor KMC kartini.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Siliwangi Nomor 355 – 357 Semarang 50146 Telepon 024-7604640, 7605660, 7605700
Faksimile 024-7607697 Laman <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>
Suratelektronik : perhubungan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Jabatan : Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Semarang, 31 Januari 2023
Pihak Pertama
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710914 199703 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Tujuan			
1	Pemantapan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah	Prosentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	59,50%
Sasaran			
1.1	Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Prosentase layanan jaringan distribusi transportasi	60,38 %
1.2	Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	Prosentase Pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	51,45 %
1.3	Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi	Prosentase operasional angkutan umum Aglomerasi yang nyaman dan handal	66,67 %
Tujuan			
2	Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Reformasi Birokrasi	75,50
Sasaran			
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai SAKIP perangkat daerah	71

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 132.784.529.000,-	APBD
2. Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 3.404.216.000,-	APBD
3. Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 3.398.751.000,-	APBD
4. Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah	Rp. 65.423.209.000,-	APBD

Semarang, 31 Januari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

H.GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710914 199703 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Siliwangi Nomor 355 – 357 Semarang 50146 Telepon 024-7604640, 7605660, 7605700
Faksimile 024-7607697 Laman <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>
Suratelektronik : perhubungan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. NANA SUDJANA, MM

Jabatan : Pj. Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, November 2023

Pihak Kedua
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH


Drs. NANA SUDJANA, MM

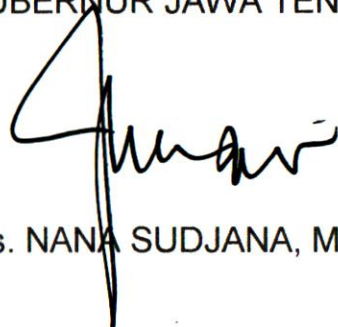
Pihak Pertama
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH


HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710914 199703 1 006

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 133.915.258.000,-	APBD
2. Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 2.586.116.000,-	APBD
3. Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 3.254.940.000,-	APBD
4. Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah	Rp. 60.849.041.000,-	APBD

Semarang, November 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. NANA SUDJANA, MM

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710914 199703 1 006